



Pemerintah
Kabupaten Mamuju

LKJIP TAHUN 2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
Kabupaten Mamuju



Dr.Hj.SITI SUTINAH SUHARDI, S.H.M.Si
Bupati

Yuki Permana, S.T
Wakil Bupati

TA. 2025



(0426) 2324500



www.mamujukab.go.id



Jl. Soekarno Hatta No. 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif dokumen ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi misi Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026. Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mamuju terwujud atas kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 serta dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Mamuju, Maret 2025



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (***Clean and good governance***) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensipitas pemerintahan terhadap tuntunan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintahan Kabupaten Mamuju berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (***Good Governance***) dan berorientasi kepada hasil (***Result, Oriented Government***) sesuai dengan kewenangan dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi,misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat di uji dan dapat diandalkan.

Pemerintah Kabupaten Mamuju telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021–2026. Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) Misi, 6 (Enam) Tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran, dengan 22 (dua puluh dua) indikator sasaran. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja, Misi III terdapat 1 tujuan,1 sasaran dan 6 indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja dan Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 6 indikator kinerja.

1. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 Sasaran dan 4 indikator kinerja :
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran atau 75 % kategori baik dan 25 % kategori Kurang.
2. Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 Indikator kinerja :
 - Capaian indikator sasaran sebanyak 4 Indikator sasaran atau 50% kategori baik sekali dan 2 indikator sasaran atau 50 % kategori Baik .
3. Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 6 indikator kinerja
 - Capaian indikator sasaran sebanyak 5 indikator sasaran atau 83,33% kategori baik Sekali 1 indikator sasaran atau 16,67 % kategori Kurang.
4. Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja :
 - Capaian indikator sasaran sebanyak 2 Indikator sasaran atau 100% kategori baik.

5. Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 6 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran sebanyak 2 Indikator sasaran atau 33,33% kategori baik sekali , Capaian indikator sasaran sebanyak 2 indikator sasaran atau 33,33 % kategori Baik serta Capaian indikator sasaran sebanyak 2 indikator sasaran atau 33,34 % kategori Cukup

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 9 indikator sasaran atau 40,90 persen bermakna Baik Sekali, 9 indikator sasaran atau 40,90 persen bermakna Baik, 2 indikator sasaran atau 9,09 persen bermakna Cukup, 2 indikator sasaran atau 9,09 persen bermakna Kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 99,98 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata- rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 107,63 persen, dikategorikan Sangat Baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 bermakna Baik, menurun sebesar 7,65 persen capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. Gambaran Umum Kondisi Daerah	3
D. Pertumbuhan Ekonomi	11
E. Kondisi Pemerintahan	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	23
A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026.....	23
1. Visi	23
2. Misi	24
3. Tujuan dan Sasaran.....	24
4. Strategi dan Arah Kebijakan.....	30
5. Strategi.....	30
B. Arah Kebijakan Tahunan	36
C. Indikator Kinerja Utama	38
D. Perjanjian Kinerja	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024	47
B. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024	51
C. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024.91	

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	91
1. Pendapatan Asli Daerah	92
2. Pendapatan Transfer	97
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	99
BAB IV PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan dan Saran	102
B. Strategi peningkatan kinerja	103

LAMPIRAN

1. Pernyataan telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju
2. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
4. LRA Tahun 2024
5. Matrix Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026
6. SOP Penyusunan LKjIP Kabupaten Mamuju Tahun 2024
7. Realisasi Target Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2024
8. Penghargaan Kabupaten Mamuju Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2024	5
Tabel I.2	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2021-2024	6
Tabel I.3	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi dan Geofisika Majene, 2024	6
Tabel I.4	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju (jiwa), 2024	8
Tabel I.5	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju,2024.....	10
Tabel I.6	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju,2024	11
Tabel I.7	Penduduk Berumur 15 Tahun keAtas Menurut Pendidikan Tertinggiyang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju,2024	11
Tabel I.8	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (persen), 2021-2024	12
Tabel I.9	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat (ribu/orang), 2020-2024	13
Tabel I.10	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, 2020-2024	13
Tabel I.11	Daftar OPD Kabupaten Mamuju tahun 2022.....	16
Tabel I.12	Pemerintahan	19
Tabel I.13	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Mamuju Menurut Jabatan, Jenis ASN dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024.....	21
Tabel II.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	25
Tabel II.2	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	31
Tabel II.3	Arah Kebijakan Pembangunan	36
Tabel II.4	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tahun2021-2026	39

Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024.....	45
Tabel III.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	48
Tabel III.2	Pencapaian Indikator Sasaran.....	49
Tabel III.3	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	49
Tabel III.4	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	51
Tabel III.5	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	57
Tabel III.6	Nilai Rata-Rata (NRR) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 7 (Tujuh) Unsur Pelayanan.....	59
Tabel III.7	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah	61
Tabel III.8	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	63
Tabel III.9	Perbandingan Target dan Capaian IKLH Kabupaten Mamuju tahun 2024	64
Tabel III.10	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya... ..	72
Tabel III.11	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	80
Tabel III.12	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor unggulan daerah.....	81
Tabel III.13	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat (persen) ,2021–2024	83
Tabel III.14	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya investasi daerah ..	85
Tabel III.15	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja.....	87
Tabel III.16	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kemandirian desa.....	89
Tabel III.17	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2024 ..	92
Tabel III.18	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024	92
Tabel III.19	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024	93
Tabel III.20	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju 2024	94

Tabel III.21 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024.....	96
Tabel III.22 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Dana Perimbangan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024.....	97
Tabel III.23 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024.....	99
Tabel III.24 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Mamuju	3
Gambar 1. 2 Luas Daerah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan , 2024	4
Gambar 1. 3 Piramida penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2024	9
Gambar 1. 4 Persentase penduduk perkecamatan di Kabupaten Mamuju, 2024	9
Gambar 3. 1 Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju tahun 2024	65
Gambar 3. 2 Peta Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2024	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Mamuju, 2022-2024....62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Laporan kinerja Kabupaten Mamuju Tahun 2024 telah tertuang didalam laporan pelaksanaan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Mamuju. Dengan demikian Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
2. Undang- undang No 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : DPA / A.1 / 4.01.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2024 tentang Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

C. Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Letak Wilayah Geografis

Kabupaten Mamuju terletak di sebelah Barat Pulau Sulawesi tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Secara Geografis Kabupaten Mamuju terletak di posisi 10° 38' 110" - 20° 54' 552" Lintang Selatan dan 110° 54' 47" - 130° 5' 35" Bujur Timur dari Jakarta; (00° 0' 0" Jakarta = 160° 48' 28" Bujur Timur Green Which).

Secara administrasi, Kabupaten Mamuju berbatasan dengan :

- ❖ Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah;
- ❖ Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Utara);
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Tana Toraja);
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makasar.

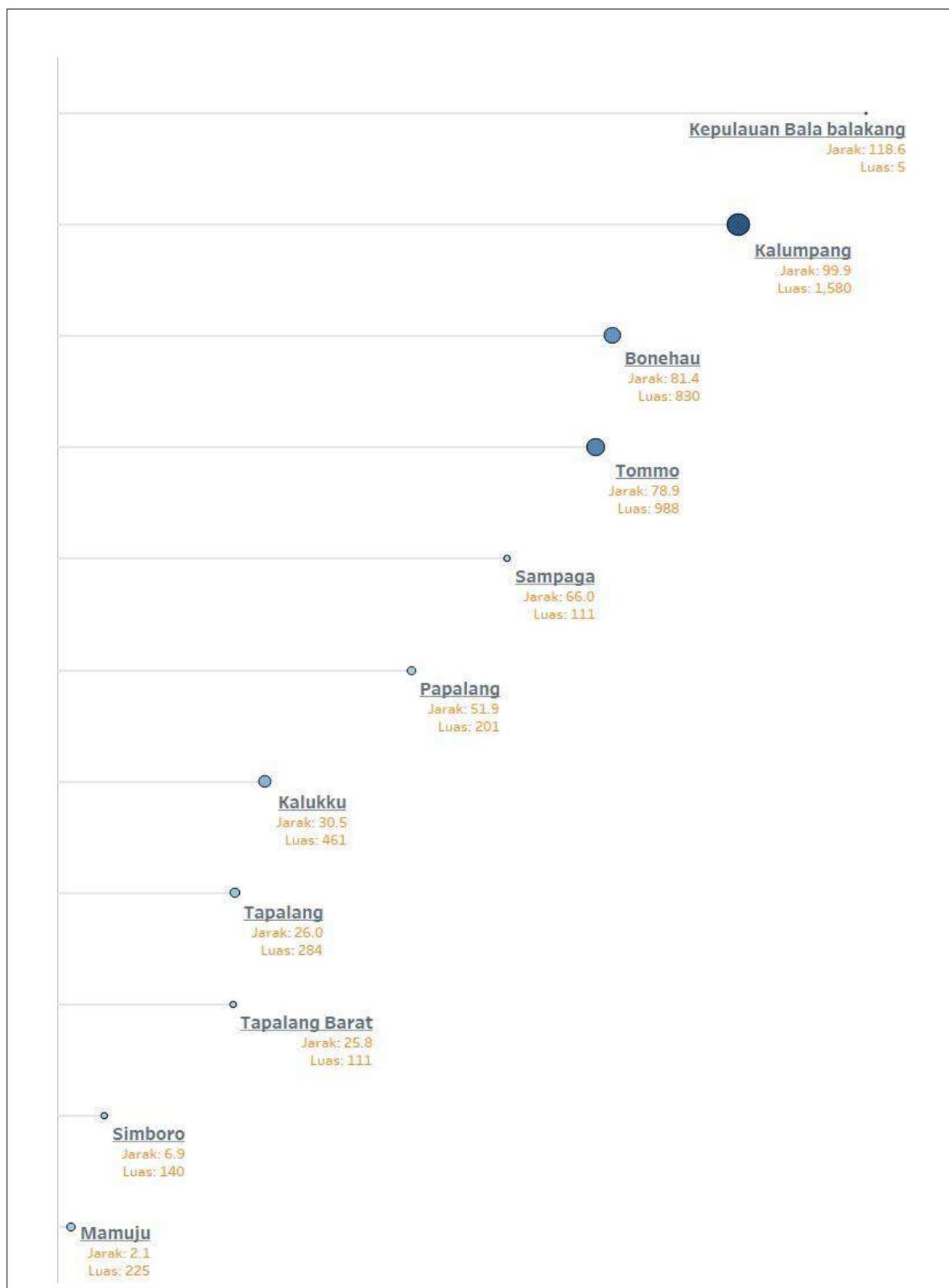
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Mamuju



Kabupaten Mamuju memiliki luas wilayah sebesar 4.936,02 km² yang secara administratif terbagi ke dalam 11 kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Kalumpang dengan luas 1.5800,07 km² atau

32,01 persen dari luas wilayah Kabupaten Mamuju. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kepulauan Bala Balakang dengan luas 5,31 km² atau 0,11 persen. Kecamatan yang letaknya paling jauh dari ibukota Kabupaten Mamuju adalah Kecamatan Kepulauan Balabalakang yaitu 188,62 km.

Gambar 1.2
Luas Daerah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan , 2024



Sumber Data : Mamuju Dalam Angka, 2025

Tabel I.1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2024

Kecamatan District	Ibukota Kecamatan Capital of District	Luas Total Area (km²/sq.km)
(1)	(2)	(3)
Tapalang	Galung	284,42
Tapalang Barat	Dungkait	110,84
Mamuju	Binanga	224,90
Simboro	Rangas	140,11
Kepulauan Balabalakang	Pulau Salissingan	5,31
Kalukku	Kalukku	460,65
Papalang	Topore	200,69
Sampaga	Bunde	110,96
Tommo	Campaloga	987,90
Kalumpang	Kalumpang	1.580,07
Bonehau	Bonehau	830,17
Kabupaten Mamuju	Karema	4.936,02
Kecamatan District		Percentase terhadap Luas Kabupaten/ Kota Percentage to Regency/Municipal Area
(1)	(4)	(5)
Tapalang	5,76	1
Tapalang Barat	2,25	1
Mamuju	4,56	2
Simboro	2,84	1
Kepulauan Balabalakang	0,11	14
Kalukku	9,33	1
Papalang	4,07	1
Sampaga	2,25	1
Tommo	20,01	1
Kalumpang	32,01	1
Bonehau	16,82	1
Kabupaten Mamuju	100,00	16

Sumber Data Mamuju Dalam Angka, 2025

Tabel I.2
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2021-2024

Kecamatan District	2021²	2022³	2023⁴	2024⁵	2024⁶
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tapalang	10	10	10	10	10
Tapalang Barat	7	7	7	7	7
Mamuju	8	8	8	8	8
Simboro	8	8	8	8	8
Kepulauan Bala Balakang	2	2	2	2	2
Kalukku	14	14	14	14	14
Papalang	9	9	9	9	9
Sampaga	7	7	7	7	7
Tommo	14	14	14	14	14
Kalumpang	13	13	13	13	13
Bonehau	9	9	9	9	9
Kabupaten Mamuju	101	101	101	101	101

2. Iklim

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim. Oleh karena itu, curah hujan beragam menurut bulan. Selama 2024 dari pantauan yang tercatat, hanya tersedia data 7 bulan pemantauan, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebanyak 530,20 mm.

Tabel I.3
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi
dan Geofisika Majene, 2024

Bulan Month	Suhu/Temperature(°C)			Kelembaban/Humidity(%)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	64,00	...	100
Februari/February	69,00	...	100
Maret/March	...	27,08	...	73,00	91,91	100
April/April	...	27,74	...	71,00	90,67	100
Mei/May	...	27,77	...	77,00	93,62	100
Juni/June	...	27,01	...	68,00	93,16	100
Juli/July	...	26,41	...	78,00	93,50	100
Agustus/August
September/September
Oktober/October
November/November
Desember/December

Lanjutan Tabel 1.3

Bulan Month	Kecepatan Angin (knot) Wind Velocity (knot)			Tekanan Udara/Atmospheric Pressure (mbar)		
	Minimum (8)	Rata-rata Average (9)	Maksimum Maximum (10)	Minimum (11)	Rata-rata Average (12)	Maksimum Maximum (13)
(1)						
Januari/January	-	2,26	5,10	1.007,10	1.010,74	1.015,20
Februari/February	-	2,18	4,60	1.007,60	1.011,63	1.015,40
Maret/March	-	2,10	5,70	1.005,40	1.009,65	1.013,60
April/April	-	2,11	6,20	1.004,60	1.008,00	1.012,20
Mei/May	-	1,93	6,20	1.003,90	1.007,96	1.011,50
Juni/June	-	1,79	5,10	1.006,30	1.009,35	1.012,90
Juli/July	-	1,97	3,60	1.005,70	1.008,96	1.013,80
Agustus/August
September/September
Oktober/October
November/November
Desember/December
+						
Bulan Month	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun) Number of Precipitation (mm/year)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	Penyinaran Matahari (jam) Duration of Sunshine (hour)			
(1)	(14)	(15)	(16)			
Januari/January	411,10	22	4,4			
Februari/February	275,00	12	6,6			
Maret/March	502,20	20	4,9			
April/April	216,40	20	6,9			
Mei/May	570,10	21	5,3			
Juni/June	279,50	20	4,7			
Juli/July	76,50	7	4,8			
Agustus/August			
September/September			
Oktober/October			
November/November			
Desember/December			

Sumber Data : Mamuju Dalam Angka, 2025

3. Kependudukan

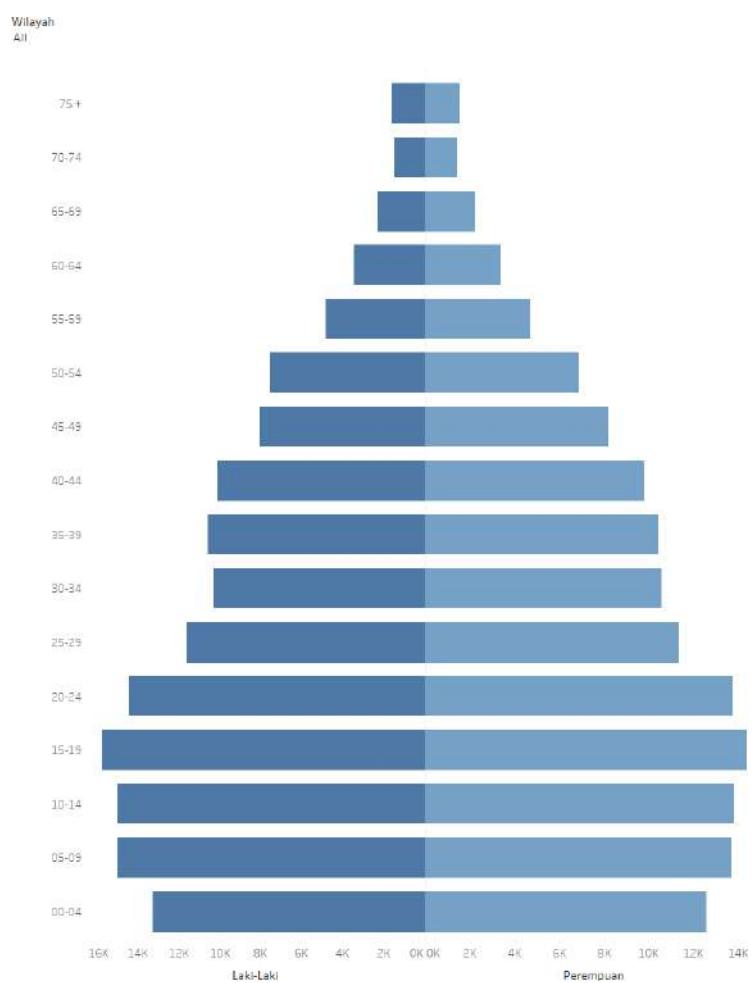
Data penduduk tahun 2024 yang disajikan pada bab ini sebelumnya adalah hasil proyeksi data Sensus Penduduk 2020. Kini, data yang digunakan bersumber dari catatan administrasi kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju tahun 2024 tercatat sebanyak 288.382 jiwa dengan rasio jenis kelamin 105. Rasio tersebut menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Mamuju lebih banyak dibandingkan perempuan.

Pada tahun 2024, kepadatan penduduk Kabupaten Mamuju mencapai 58,42 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Kepulauan Balabalakang, dengan 2.282,96 jiwa per km².

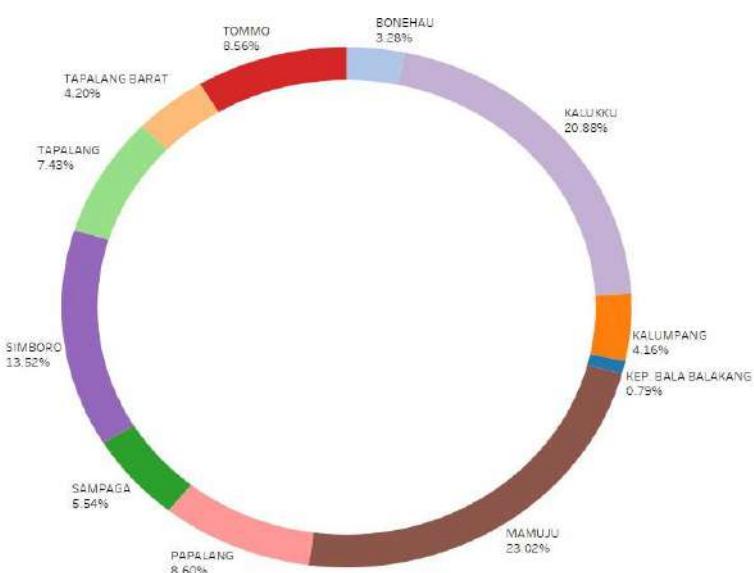
Tabel I.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Mamuju (jiwa), 2024

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	13,2	12,4	25,5
5-9	15,2	14,0	29,2
10-14	14,9	13,9	28,8
15-19	15,5	13,9	29,4
20-24	14,9	14,0	28,9
25-29	12,0	11,6	23,6
30-34	10,5	10,6	21,1
35-39	10,6	10,4	21,0
40-44	10,2	10,0	20,2
45-49	8,5	8,4	16,9
50-54	7,5	7,0	14,5
55-59	5,3	5,1	10,4
60-64	3,7	3,6	7,3
65-69	2,5	2,4	4,9
70-74	1,6	1,6	3,2
75+	1,7	1,7	3,4
Kabupaten Mamuju	147,8	140,6	288,4

Gambar 1.3
Piramida penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2024



Gambar 1.4
Persentase penduduk perkecamatan di Kabupaten Mamuju, 2024



BONEHAU	KALUKKU	KALUMPA	KEP. BALA BALAKANG	MAMUJU	PAPALANG	SAMPAGA	SIMBORO	TAPALANG	TAPALANG BARAT	TOMMO
9,308	59,320	11,831	2,242	66,402	24,436	15,741	38,418	21,095	11,944	34,326

Tabel I.5
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju,2024

Kecamatan District	JumlahPenduduk(jiwa) Population(people)	LajuPertumbuhanPendudukper Tahun2023-2024(%) AnnualPopulationGrowthRate 2023-2024(%)	
		(2)	(3)
Tapalang	32.675		0,19
TapalangBarat	10.460		0,3
Mamuju	29.281		0,29
Simboro	5.728		0,43
KepulauanBalaBalakang	12.127		0,17
Kalukku	7.835		0,07
Papalang	11.780		0,08
Sampaga	19.356		0,75
Tommo	5.862		0,27
Kalumpang	4.443		0,14
Bonehau	1.080		0,52
KabupatenMamuju	288.382		0,29

Sumber Data Mamuju Dalam Angka ,2025

4. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah modal bagi pembangunan suatu bangsa. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada tahun 2024 terdapat 213.059 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju. Bagian yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK) Mamuju tahun 2024 sebesar 75,48 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,77 persen. Jumlah angkatan kerja yang bekerja sekitar 156.375 orang.

Tabel I.6
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju,2024

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-Laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I.Angkatankerja/ <i>Economically active</i>	96.343	64.484	160.827
1.Bekerja/ <i>Working</i>	94.703	61.672	156.375
2.Pengangguranterbuka/ <i>Unemployment</i>	1.640	2.812	4.452
II.Bukanangkatankerja/ <i>Noteconomically active</i>	12.580	39.652	52.232
Jumlah/Total	108.923	104.136	213.059

Tabel I.7
Penduduk Berumur 15 Tahun keAtas Menurut Pendidikan Tertinggiyang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju,2024

Pendidikan Tertinggiyang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment¹</i>	AngkatanKerja/ <i>Economically Active</i>			PercentaseBekerja terhadapAngkatan Kerja <i>Percentageof Workingto Economically Active</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran ² <i>Unemployment²</i>	Jumlah AngkatanKerja <i>Totalof Economically Active</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	67.805	1.565	69.370	0,98
1	22.183	380	22.563	0,98
2	40.951	2.356	43.307	0,95
3	25.436	151	25.587	0,99
Jumlah/Total	156.375	4.452	160.827	0,97

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Sulawesi Barat mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2024, dengan beberapa tahun mengalami kontraksi dan beberapa tahun lainnya mengalami pertumbuhan positif. Meskipun demikian,

secara keseluruhan, terdapat tren positif dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang cenderung meningkat selama periode tersebut. Pasangkayu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup variatif, termasuk tahun dengan pertumbuhan negatif yang signifikan pada tahun 2020, namun menunjukkan pemulihan yang kuat pada tahun 2024.

Dilihat dari data jumlah penduduk miskin, Kabupaten Mamuju masih cukup rendah dibandingkan kabupaten lain. Jumlah penduduk miskin kabupaten mamuju pada 2023 diperkirakan sebanyak 22,64 ribu atau tidak sampai setengah dari yang tertinggi di polewali mandar yang mencapai 70,42 ribu orang. Capaian kualitas hidup tercermin melalui IPM. Tahun 2024, capaian IPM Kabupaten Mamuju sebesar 71,86. Nilai IPM Kabupaten Mamuju berada di posisi kedua dari enam kabupaten di Sulawesi Barat.

Tabel I. 8
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (persen), 2021-2024

<i>Kabupaten/Kota Regency/Municipality</i>	2021 (1)	2022 (2)	2023* (3)	2024** (5)
Majene	2,13	2,38	5,29	5,30
PolewaliMandar	1,87	3,58	4,56	5,94
Mamasa	2,00	1,79	3,36	3,26
Mamuju	2,35	3,28	4,47	6,47
Pasangkayu	3,78	-0,02	6,78	0,68
MamujuTengah	3,26	2,34	2,77	2,98
SulawesiBarat	2,57	2,26	5,23	4,76

Sumber Data : Mamuju Dalam Angka Tahun 2025

Tabel I.9
Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat
(ribu/orang), 2020-2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	24,12	25,01	26,62	25,80	24,41
PolewaliMandar	68,18	69,32	72,87	71,92	70,42
Mamasa	21,86	22,29	23,70	23,58	23,61
Mamuju	20,65	22,30	23,26	23,50	22,64
Pasangkayu	7,95	8,53	9,30	8,94	9,95
MamujuTengah	9,25	9,74	9,98	10,39	11,16
SulawesiBarat	152,01	157,19	165,72	164,14	162,19

Tabel I.10
Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Barat, 2020-2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Majene	2,13	2,38	5,29	5,30
PolewaliMandar	1,87	3,58	4,56	5,94
Mamasa	2,00	1,79	3,36	3,26
Mamuju	2,35	3,28	4,47	6,47
Pasangkayu	3,78	-0,02	6,78	0,68
MamujuTengah	3,26	2,34	2,77	2,98
SulawesiBarat	2,57	2,26	5,23	4,76

Sumber Data : Mamuju Dalam Angka Tahun 2025

E. Kondisi Pemerintahan

Pemerintahan daerah Kabupaten Mamuju terdiri dari Bupati, Wakil Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Ketahanan Hidup dan Kebersihan; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Kantor Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan; Dinas Perdagangan; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Kecamatan; dan Kelurahan.

Struktur organisasi Kabupaten Mamuju mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju . Adapun Organisasi Perangkat Daerah Terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat
4. Dinas Daerah;
5. Badan Daerah; dan
6. Kecamatan.

Dengan uraian OPD berdasarkan Tipe sebagai berikut

1. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud merupakan Perangkat Daerah Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) asisten.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Perangkat Daerah

Tipe B. terdiri atas 3 (tiga) bagian. Dan 3 (tiga) subbagian.

3. Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A.
4. Dinas Daerah terdiri atas :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Tipe A;
 - f. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe B;
 - g. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe B;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan Dinas Tipe B;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe B;
 - n. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B;
 - o. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe A;
 - p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian merupakan Dinas Tipe B;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Non Tipe;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B;
 - s. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A;
 - t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A;
 - u. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan merupakan Dinas Tipe B;
 - v. Dinas Perkebunan merupakan Dinas Tipe B;
 - w. Dinas Perdagangan merupakan Dinas Tipe B;
5. Badan Daerah terdiri atas :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi merupakan Badan Daerah Tipe A;

- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah Tipe A;
 - c. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah Tipe B;
 - d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Daerah Tipe B;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Daerah Tipe A;
6. Kecamatan terdiri atas :
- a. Kecamatan Tapalang Barat merupakan kecamatan Tipe A;
 - b. Kecamatan Mamuju merupakan kecamatan Tipe A;
 - c. Kecamatan Simboro merupakan kecamatan Tipe A;
 - d. Kecamatan Tapalang merupakan kecamatan Tipe A;
 - e. Kecamatan Kepulauan Balabalakang merupakan kecamatan Tipe A;
 - f. Kecamatan Kalukku merupakan kecamatan Tipe A;
 - g. Kecamatan Papalang merupakan kecamatan Tipe A;
 - h. Kecamatan Sampaga merupakan kecamatan Tipe A;
 - i. Kecamatan Tommo merupakan kecamatan Tipe A;
 - j. Kecamatan Kalumpang merupakan kecamatan Tipe A;
 - k. Kecamatan Bonehau merupakan kecamatan Tipe A.

Tabel I.11
Daftar OPD Kabupaten Mamuju tahun 2024

No	Organisasi Perangkat Daerah
1	Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Dinas Sosial
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

11	Dinas Perkebunan
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
18	Dinas Perdagangan
19	Dinas Ketahanan Pangan
20	Dinas Kelautan dan Perikanan
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
22	Dinas Kesehatan
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
24	Inspektorat
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
27	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
28	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
31	Sekretariat DPRD
32	Sekretariat Daerah
33	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
34	Bagian Tata Pemerintahan
35	Bagian Kesejahteraan Rakyat

36	Bagian Hukum
37	Bagian Kerja Sama
38	Bagian Perekonomian
39	Bagian Administrasi Pembangunan
40	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
41	Bagian Sumber Daya Alam
42	Bagian Umum
43	Bagian Organisasi
44	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
45	Bagian Perencanaan dan Keuangan
46	Kecamatan Mamuju
47	Kecamatan Simboro
48	Kecamatan Tapalang
49	Kecamatan Tapalang Barat
50	Kecamatan Kalukku
51	Kecamatan Kalukku
52	Kecamatan Sampaga
53	Kecamatan Tommo
54	Kecamatan Bonehau
55	Kecamatan Kalumpang
56	Kecamatan Bala-Balakang

Aparat sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkup pemerintah daerah kabupaten mamuju sebanyak 5.369 orang yang terdiri dari 4.028 orang pegawai negeri sipil dan 1.341 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja.

Jika dilihat dari komposisi menurut jenis kelamin, terdapat sekitar 38,2 persen ASN adalah laki-laki dan 61,8 persen perempuan. Proporsi ASN

menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut 0,09 persen berpendidikan SD, 0,17 persen berpendidikan SLTP/Sederajat, 13,28 persen berpendidikan SMA/ Sederajat, 9,29 persen berpendidikan Diploma I-III, 77,17 persen berpendidikan sarjana ke atas. Komposisi ini dinamis namun ada kecenderungan kualifikasinya makin tinggi.

Dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah menangani beberapa Urusan Pemerintahan berdasarkan Tugas dan fungsi OPD tersebut, adapun Urusan - urusan yang dilaksanakan dipaparkan dalam table sebagai berikut :

Tabel I.12
Pemerintahan

URUSAN	KETERANGAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
FUNGSI SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	

FUNGSI PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
FUNGSI KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
FUNGSI KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	SEMUA KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel I.13
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Mamuju Menurut Jabatan, Jenis ASN dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024

Jabatan <i>Occupation</i>	Pegawai Negeri Sipil <i>Civil Servant</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama <i>Senior Executives</i>	0	0	0
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya <i>Middle Executives</i>	0	0	0
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama <i>Junior Executives</i>	27	6	33
Administrator / Administrator	116	55	171
Pengawas / Supervisor	133	101	234
Eselon V / 5 th Echelon	0	0	0
Jabatan Fungsional Dosen <i>Certain Functional Position for Lecturer</i>	0	0	0
Jabatan Fungsional Guru <i>Certain Functional Position for Teacher</i>	535	852	1.387
Jabatan Fungsional Medis <i>Certain Functional Position for Medical Field</i>	107	540	647
Jabatan Fungsional Teknis <i>Certain Functional Position for Technical Field</i>	246	240	486
Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana <i>General Functional Position</i>	565	505	1.070
Jumlah / Total	1.729	2.299	4.028

Jabatan <i>Occupation</i>	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja <i>Government Contractual Employe</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(5)	(6)	(7)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama <i>Senior Executives</i>	0	0	0
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya <i>Middle Executives</i>	0	0	0
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama <i>Junior Executives</i>	0	0	0
Administrator / <i>Administrator</i>	0	0	0
Pengawas / <i>Supervisor</i>	0	0	0
Eselon V / 5 th Echelon	0	0	0
Jabatan Fungsional Dosen <i>Certain Functional Position for Lecturer</i>	0	0	0
Jabatan Fungsional Guru <i>Certain Functional Position for Teacher</i>	279	842	1.121
Jabatan Fungsional Medis <i>Certain Functional Position for Medical Field</i>	43	177	220
Jabatan Fungsional Teknis <i>Certain Functional Position for Technical Field</i>	0	0	0
Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana <i>General Functional Position</i>	0	0	0
Jumlah / Total	322	1.019	1.341

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada tahun 2024, komposisi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Mamuju berjumlah 30 orang, terdiri dari 28 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Proporsi anggota DPRD menurut parpol terbanyak adalah Partai Demokrat dengan 9 orang, 1 di antaranya perempuan. Disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) masing-masing dengan 4 wakil.

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju (orang), 2024

Partai Politik <i>Political Parties</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Demokrat	8	1	9
Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	2	-	2
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3	-	3
Partai Amanat Nasional (PAN)	1	1	2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4	-	4
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2	-	2
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	-	1
Partai Bulan Bintang (PBB)	1	-	1
Partai Nasional Demokrat (NasDem)	4	-	4
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	-	2
Kabupaten Mamuju	28	2	30

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi pembangunan untuk periode 2021-2025 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka Panjang Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri pada tahun 2025.

Tantangan tahapan priode ini sangat berat untuk memenuhi target RPJPD 2025 setelah Kabupaten Mamuju terdampak covid 19 dan gempa bumi yang melumpuhkan hampir semua sendi kehidupan. Sangat diperlukan Visi yang kuat, kreatifitas dan inovasi yang tinggi agar harapan untuk mencapai Mamuju yang maju dan Mandiri dapat dicapai. Kenyataan tersebut menjadi latar belakang penting lima tahun ke depan untuk memberikan focus dan perhatian pada peletakan Kembali sendi-sendi pembangunan yang berorientasi pada hasil (*out come*) dengan memanfaatkan semua kekuatan berupa potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, peluang letak geografi dan demografi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut Tema Visi “Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri” dapat di rumuskan bahwa Mamuju Maju dan Mandiri menjadi arah pembangunan Kabupaten Mamuju dalam lima tahun ke depan dengan Visi :

MAMUJU KEREN
(Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif,
Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021- 2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

Visi Mamuju “KEREN” (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
4. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedapankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.
5. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005-2025, tujuan dan sasaran RPJMN, dan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

Penjabaran tujuan dan sasaran Kabupaten Mamuju Tahun 2021- 2026 yang akan dicapai pada masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020/2021	Target Kinerja				
							2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	CC	B	B	BB	A
							Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Peringkat	BAIK	BAIK	BAIK
							Nilai LPPD	Skor	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
				c. Indeks Kepuasan Masyarakat			Skor	80	90	90	90

2	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan		1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Perse n	N/A	50	60	70	80	90
				a.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Perse n	N/A	50	60	70	80	90
				b.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Perse n	77,14	77,4 1	77,68	77,95	78,22	78,4 9
				c.	Indeks Resiko Bencana	Predik at	Tinggi	Tingg i	Tinggi	Sedang	Sedang	Sed an g
3	Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan,	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Perse n	68,15%	68,3 5 %	68,50 %	68,70 %	68,85 %	69,0 5 %

Kesehatan dan Sosial.		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	a.	Indeks Pendidikan	Skala	0,26	0,30	0,36	0,42	0,50	0,55
			b.	Indeks Kesehatan	Skala	0,508	0,522	0,556	0,578	0,612	0,632
			c.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Rupiah / Orang/Tahun	Ribu Rupiah / Orang/Tahun	9.500	12.00	24.000	32.500	44.000	52.000
			d.	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	58,96	59,12	59,58	59,87	60,12	60,55
			e.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	50	55	60	65	70	75
4	Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal	Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara	1	Indeks ketentramandan ketertibahan	Persen	N/A	100	100	100	100	100

			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	a.	Indeks Kriminilitas	Persen	N/A	100	100	100	100	100
5	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi		1	Indeks Gini	Persen	0,36	0,32	0,28	0,25	0,20	0,19
			Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	a.	Pertumbuhan ekonomi	Persen	-2,08	5.0-5.5%	5.5-5.6%	5.6-5.7%	5.7-5.8%	5.8-6.0%
			Meningkatnya investasi daerah	b.	Pertumbuhan Investasi	Persen	15	15	15	15	15	15
		Mengentaskan Kemiskinan		2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,4	6	5,5	5	4,5	4

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020/2021	Target Kinerja				
							2022	2023	2024	2025	2026
			Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,89	2,75	2,49	2,27	2,05	2,00
			Meningkatnya kemandirian desa	b. Indeks Desa Membangun	Skala	0,611 (Berkembang)	0,624 (Berkembang)	0,645 (Berkebang)	0,687 (Berkebang)	0,700 (Berkebang)	0,707 (Maju)

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.2
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih	Meningkatnya kinerja Keuangan dan Pengawasan	Pembentukan SDM yang tangguh melalui pelayanan penataan aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai
				Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Investasi melalui perbaikan proses dan pelayanan perijinan dengan menerapkan sistem aplikasi berbasis online
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan manajemen pemerintahan yang akuntabel melalui, pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, secara terpadu; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas APIP
				Peningkatan implementasi single data dan pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi melalui Kartu Mamuju Keren
2	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur; pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh; dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru
				Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan
				Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung, sanitasi dan air bersih serta pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan dan rehabilitasi, serta pengalihan status jalan

		Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan		<p>Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan</p> <p>Peningkatan akses informasi tata ruang dan cegah dini pelanggaran tata ruang melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan infomatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kedaulatan dan penataan pembangunan</p>
		Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup		<p>Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tutupan lahan dan udara</p>
				<p>Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah</p> <p>Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana</p>
3 .	Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	<p>a. Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan melalui: pengembangan pendidikan karakter dan peningkatan ekosistem Pendidikan;</p> <p>b. peningkatan motivasi belajar dan pemberian bantuan bagi peserta didik agar tidak putus sekolah;</p> <p>c. pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pengadaan buku ajar, dan pengembangan kapasitas sekolah;</p> <p>d. peningkatan kualifikasi dan pemerataan guru sesuai dengan kebutuhan</p> <p>e. Meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang SD dan SMP melalui Gerakan Kembali Bersekolah</p>

				Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat
				Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk melalui intensifikasi program Keluarga Berencana
				Adanya Regulasi atau kebijakan terkait permasalahan ketimpangan gender
				Membudayakan berolahraga agar dapat hidup sehat dan meningkatkan prestasi olahraga melalui pembibitan atlet peningkatan kompetensi atlet berbakat, pelatih dan wasit melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga.
				Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka.
				Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau.
				Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarustamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarustamaan hak anak dan perlindungan khusus anak
				Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tertangani melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial

4.	Mewujudkan daerah	Meningkatkan kedisiplinan,	Meningkatnya	Peningkatan kondusifitas daerah melalui pembinaan politik dan wawasan kebangsaan untuk mengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat.
----	-------------------	----------------------------	--------------	---

	yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.	ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragam yang kondusif dan terpelihara	ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan Ketertiban umum melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan pembinaan PPNS.
5 .	Mewujudkan dayasaing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	<p>Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi pertanian, serta penanganan bencana pertanian</p> <p>Meningkatkan pengembangan ternak melalui penyediaan sarana dan prasarana peternakan, dan pemanfaatan teknologi peternakan, serta peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner</p> <p>Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan penerapan cara budidaya ikan yang baik, dan penyediaan sarana produksi perikanan</p> <p>Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah.</p> <p>Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah</p> <p>Memfokuskan penyelesaian administrasi persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mamuju</p> <p>Meningkatkan kunjungan wisata melalui penyelenggaraan event, keberagaman atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru</p> <p>Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pengembangan seni dan budaya dan</p>

			pembangunan museum.
		Meningkatnya investasi daerah	Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi
Pengentasan Kemiskinan		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Mengurangi pengangguran melalui pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
		Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatkan kemandirian melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa

B. Arah Kebijakan Tahunan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamuju, ditetapkan arah kebijakan tahunan dalam RKPD tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026. Arah kebijakan tahunan ini menjadi acuan dan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya.

Tabel II.3
Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
KEREN I Penguatan birokrasi penopang utama pemulihan ekonomi	KEREN II Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan	KEREN III Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan	KEREN IV Menguatkan Pembangunan Manusia dan Kemandirian Ekonomi di Seluruh Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelaanjutan	Mamuju KEREN (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) Menstabilisasi Kemandirian Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan disertai dengan Penurunan Kesenjangan Kabupaten Mamuju

Perincian arah kebijakan perencanaan tahunan pada RKPD Tahun 2024 sampai dengan RKPD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

1) Arah Kebijakan Transisi Tahun 2021

Pembangunan tahun 2021 diarahkan pada: "Memantapkan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Mamuju yang berketahanan Sosial"

Prioritas pembangunan tahun 2021 diarahkan pada:

- a. Penurunan Kemiskinan
- b. Daya saing ekonomi lokal
- c. Penurunan ketimpangan wilayah

2) Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: "KEREN I : Penguatan birokrasi penopang utama pemulihan ekonomi"

Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Implementasi single data didukung teknologi informasi terintegrasi
- b. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi
- d. Peningkatan PAD dengan membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi
- e. Peningkatan kapasitas SDM UMKM bagi petani dan masyarakat perdesaan;
- f. Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata.

3) Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: "KEREN II Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan"

Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Peningkatan produktivitas pada pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi berbasis potensi daerah
- b. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat
- c. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah
- d. Peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)

4) Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan tahun 2024 diarahkan pada: "KEREN III Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan"

Prioritas pembangunan tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup
- b. Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas
- c. Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya
- d. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
- e. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif.

5) Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 diarahkan pada: "KEREN IV Menguatkan Pembangunan Manusia dan Kemandirian Ekonomi di Seluruh Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelaanjutan"

Prioritas pembangunan tahun 2025 diarahkan pada:

- a. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- b. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
- c. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
- d. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dan pengurangan kemiskinan.

6) Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan tahun 2026 sebagai tahun terakhir RPJMD diarahkan pada: "Mamuju KEREN (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) Menstabilisasi Kemandirian Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan disertai dengan Penurunan Kesenjangan Kabupaten Mamuju".

Prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada:

- a. Pemantapan kebersamaan dalam mengisi pembangunan dan menjaga kondusifitas wilayah.
- b. Pemantapan keunggulan dan daya saing ekonomi berbasis potensi sumber daya local.
- c. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, berdaya saing dan berkarakter
- d. Pemantapan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)
- e. Pemantapan sarana dan prasarana untuk menunjang pertumbuhan wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

C. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Mamuju dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju sebagaimana tertuang pada Tabel berikut :

Tabel II. 4
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tahun2021-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020/2021	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	%	68,15	68,35	68,50	68,70	68,85	69,05	69,05
2.	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Skala	0,26	0,30	0,36	0,42	0,50	0,55	0,55
3.	Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	Skala	0,508	0,522	0,556	0,578	0,612	0,632	0,632
4.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)	$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	9.500	12.000	24.000	32.500	44.000	52.000	52.000
5.	Indeks Pemberdayaan Gender	$IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-des)}}{3}$	%	58,96	59,12	59,58	59,87	60,12	60,55	60,55

6 .	Indeks Kesejahteraan Sosial	40% Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 30% Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 30% Persentase PSKS yang aktif	%	50	55	60	65	70	75	75
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	[40%{50% (50% kualitas sarpras jalan& jembatan + 50% kualitas PJU) } + {40 % (50% kualitas saluran pengairan + 50%drainase kondisi baik)} } + (10 % Pemenuhan bangunansesuai standar)] + [20%{50% pengurangansampah + 50 % pengangkutan sampah }]+30%Level of Service + [10% ({50% kampungtangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi} +{30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran+30% edukasi	%	N/A	50	60	70	80	90	90

		proteksi kebakaran+40 % response time })/2]								
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Survey kepuasan layanan infranstruktur : 1. Ketersediaan Fisik(<i>availability</i>) 2. Kualitas Fisik (<i>quality</i>) 3. Kesesuaian (<i>Appropriateness</i>) 4. Efektifitas Pemanfaatan (<i>Utility</i>) 5. Penyerapan Tenaga Kerja (<i>Job Creation</i>) 6. Kontribusi pada Perekonomian	%	N/A	50	60	70	80	90	90
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	30%IKU + 30% IKA + 40% ITV	%	N/A	80	80	80	80,5	80,6	80,6
	Indeks Resiko Bencana	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kasus tertangani tahun n-1 dibagi jumlah kasus tahun n dikali 100	%	N/A	100	100	100	100	100	100

	Indeks Kriminilitas	$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$	%	N/A	100	100	100	100	100	100
	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} (F_{ci-1} + Y_{ci})$	%	0,36	0,32	0,28	0,25	0,20	0,19	0,19
	Pertumbuhan Ekonomi	$R(t-1, t) = (PDBt - PDBt-1) / PDBt-1 \times 100\%$	%	-2,08	5.0-5.5%	5.5-5.6%	5.6-5.7%	5.7-5.8%	5.8-6.0%	5.8-6.0%
	Pertumbuhan Investasi	$CAGR = \left(\frac{\text{Ending Value}}{\text{Beginning Value}} \right)^{\frac{1}{\# \text{ of years}}} - 1$	%	15	15	15	15	15	15	15
	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk Miskin dikali 100	%	7,4	6	5,5	5	4,5	4	4
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$TPT = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	%	2,89	2,75	2,49	2,27	2,05	2,00	2,00
	Indeks Desa Membangun	$IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$	Skala	0,683	0,690	0,695	0,698	0,700	0,707	0,707
	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor hasil evaluasi mandiri reformasi birokrasi	Predikat	C	CC	B	B	BB	A	A
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran + pengalokasian anggaran belanja dalam APBD +	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

		Transparansi pengelolaan keuangan + Penyerapan anggaran + Kondisi keuangan daerah + Opini BPK								
	Nilai LPPD	Hasil Penilaian LPPD	Skor	Tinggi	Sangat Tinggi					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Skor	80	90	90	90	90	90	90

D. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Perjanjian kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

1) Tujuan Perjanjian Kinerja

Tujuan Perjanjian kinerja, terbagi atas tujuan umum dan khusus. Tujuan umum diantaranya meliputi :

- a) Intensifikasi pencegahan korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya meliputi:

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah (mandat);
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi;

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024

SASARAN 1 Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Peringkat	Baik
Nilai LPPD	Skor	Sangat Tinggi

SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	90

SASARAN 3 Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	70
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	70

SASARAN 4 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	80
Indeks Resiko Bencana	Predikat	Sedang

SASARAN 5 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Indeks Pembangunan Manusia	Persen	68,70
Indeks Pendidikan	Skala	0,42
Indeks Kesehatan	Skala	0,578

Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	32.500
Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	59,87
Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	65
SASARAN 6 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	100
Indeks Kriminilitas	Persen	100
SASARAN 7 Meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor unggulan daerah		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Indeks Gini	Persen	0,25
Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,6- 5,7%
SASARAN 8 Meningkatnya investasi daerah		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Pertumbuhan Investasi	Persen	15
SASARAN 9 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Persentase Penduduk Miskin	Persen	5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,27
SASARAN 10 Meningkatnya kemandirian desa		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Indeks Desa Membangun	Skala	0,698 (Berkembang)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Mamuju tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik.

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Mamuju selaku pengembang amanah masyarakat Mamuju melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Mamuju.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju 2022-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Mamuju. Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara

membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel III.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI		
1	Lebih dari 100	Sangat Baik
2	75 – 100	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Secara umum Pemerintah Kabupaten Mamuju telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021–2026. Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) Misi, 6 (Enam) Tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran, dengan 16 (enam belas) indikator sasaran. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 5 indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja dan Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja.

Mengacu pada Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021–2026, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja;
2. Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja;

3. Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 6 indikator kinerja;
4. Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja;
5. Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 6 indikator kinerja.

Tabel III.2
Pencapaian Indikator Sasaran

NO.	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1	Misi1	1	2	4	BS=0, B=3, C=0, K=1
2	Misi2	1	2	4	BS=2, B =2, C=0, K=0
3	Misi3	1	1	6	BS=5, B=0, C= 0, K=1
4	Misi4	1	1	2	BS=0, B =2, C=0, K=0
5	Misi5	2	4	6	BS=2, B =2, C=2, K=0
	JUMLAH	6	1 0	22	BS=9, B=9, C=2, K=2

Dari 10 (Sepuluh) sasaran dengan 22 (Dua Puluh Dua) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah:

Tabel III.3
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Misi I (4 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	0	0
2	Baik	3	75
3	Cukup	0	0
4	Kurang	1	25

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
	Jumlah	4	100
Misi II (4 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	2	50
2	Baik	2	50
3	Cukup	0	0
4	Kurang	0	0
	Jumlah	4	100
Misi III (6 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	5	83,33
2	Baik	0	0
3	Cukup	0	0
4	Kurang	1	16,67
	Jumlah	6	100
Misi IV (2 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	0	0
2	Baik	2	100
3	Cukup	0	0
4	Kurang	0	0
	Jumlah	2	100
Misi V (6 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	2	33,33
2	Baik	2	33,33
3	Cukup	2	33,34
4	Kurang	0	0
	Jumlah	6	100

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 9 indikator sasaran atau 40,90 persen bermakna Baik Sekali, 9 indikator sasaran atau 40,90 persen bermakna Baik, 2 indikator sasaran atau 9,09 persen bermakna Cukup, 2 indikator sasaran atau 9,09 persen bermakna kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 99,98 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata- rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 107,63 persen dikategorikan Sangat Baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 bermakna Baik, menurun sebesar 7,65 persen jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023.

B. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai diatas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel III.4

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	B	B	100
2	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Peringkat / Nilai	Sangat Perlu Perbaikan / C	Baik / A	Perlu Perbaikan / B	75
3	Nilai LPPD	Skor	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	50
Rata-rata capaian						75

Pada sasaran Strategis 1 Indeks Reformasi Birokrasi ini disebutkan realisasi pada tahun 2024 adalah Predikat B dari target Daerah Predikat B dengan persentase capaian sebesar 100 persen capaian tersebut masih merupakan angka sementara pada Daerah Kabupaten Mamuju. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 yaitu dengan predikat CC atau dengan persentase capaian sebesar 75 persen dilihat terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini menggambarkan adanya peningkatan realisasi kinerja pemerintah Kabupaten Mamuju.

Dari hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 pada saat penyusunan lakipl dalam tahapan masa sanggah yang terpublish di portal RB dengan uraian RB General memperoleh Indeks 59,98 sedangkan RB Tematik memperoleh indeks 9,59 sehingga Total nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Mamuju Tahun 2024 adalah 69,57 atau Predikat B.

Pelaksanaan Reformasi birokrasi general di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju telah memasuki tahun ke-2 pelaksanaan berdasarkan road map RB nasional yang telah mengalami perubahan. Pemerintah Kabupaten Mamuju telah mengupayakan perbaikan-perbaikan demi tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi general di tingkat mikro. Upaya perbaikan yang dilakukan terlihat dari penetapan Indikator Penilaian yang terdiri atas 24 kegiatan utama dan 5 Reformasi Birokrasi Tematik di tahun 2024 untuk menjawab rekomendasi dan tindaklanjut atas laporan hasil evaluasi serta permasalahan strategis yang terjadi di lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju yaitu sebagai berikut :

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,42	2,42
Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	82	4,63
Tingkat Capaian Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi	3	4	2,4
Tingkat Maturitas SPIP	4	3,15	2,52
Tingkat Maturitas SPIP	4	3,15	2,52
Nilai SAKIP	4	62,97	2,52
Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	31,58	0,79
Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2,5	2	1

Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	0	0
Indeks Reformasi Hukum	2,5	97,16	2,43
Indeks Pembangunan Statistik	2,5	1,94	0,97
Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	68,81	1,72
Indeks Sistem Merit	4	158	1,54
Indeks Pelayanan Publik	2	2,87	1,15
Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	84,4	1,69
Indeks SPBE	9	2,42	4,35
Capaian IKU Makro	4	94,99	3,8
Capaian IKU Non Makro	6	68	2,57
Opini BPK	5	3	5
Tindak Lanjut Rekomendasi	4	61,92	2,48
Indeks BerAkhlaq	4	57,25	2,29
Survei Penilaian Integritas	10	65,45	6,54
Survei Kepuasan Masyarakat	8	89,59	7,17
Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1	0,73	0,73
Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0,75	0,75
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0,68	0,68
Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1	0,62	0,62
Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1	0	0
Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,85	1,85
Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,87	1,87
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0,86	0,86
Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,23	2,23
Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	0	0
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2,5	0	0

Hasil penilaian Indikator Reformasi Birokrasi terdapat 3 indikator penilaian yang belum mendapatkan skor. Pada indeks reformasi hukum baru akan dilaksanakan tahun 2025 dan

pada Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE sampai saat ini belum di implementasikan sebab masih dalam tahap penyusunan regulasi untuk penetapan regulasi arsitektur SPBE dilaksanakan di Kabupaten Mamuju. Sedangkan pada Indikator penilaian Pengendalian Inflasi masih dalam tahap sanggah, karena Kemenpan RB memberikan kesempatan kepada K/L/D untuk melakukan sanggah terhadap hasil evaluasi RB. Pemkab Mamuju ikut melakukan sanggah terhadap Nilai RB Tematik Inflasi dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan pengendalian inflasi di kabupaten Mamuju. Hasil akhir Evaluasi RB pasca sanggah belum keluar saat laporan ini terbit.

Diharapkan melalui Reformasi Birokrasi ini dapat mengakseslarasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Mamuju pada sisi perencanaan melakukan penyelarasan antara Road Map Reformasi Birokrasi daerah dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada sisi pelaksanaan dilakukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Perangkat Daerah se kabupaten mamuju, sehingga mampu memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh Masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju.

Pada Indikator kedua yaitu Indeks Pengelolaan keuangan Daerah dijelaskan bahwa Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023 Tahun Ukur 2024 untuk capaian pemerintah Kabupaten Mamuju diperoleh peringkat Perlu Perbaikan dengan Nilai B, capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya dengan capaian peringkat Sangat Perlu

Perbaikan dengan Nilai C. Hal ini menunjukkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Dalam regulasi tersebut menjelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur penilaian, adapun uraian dari Enam dimensi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran

Secara umum, pemerintah daerah telah senantiasa melakukan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran (RPJMD-RKPD-KUA/PPAS-APBD). Namun, seiring dengan pelaksanaan penyusunan dokumen tersebut, terdapat kebijakan-kebijakan yang terlambat ditetapkan sehingga mengakibatkan ada ketidaksesuaian dari jumlah program/kegiatan/sub kegiatan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.

2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD.

APBD Kabupaten Mamuju Tahun 2024 mengutamakan pemenuhan belanja yang bersifat mandatory (belanja wajib) dengan penyediaan alokasi Belanja fungsi Pendidikan sebesar 34,05 persen dari total APBD, penyediaan alokasi urusan kesehatan sebesar 21,79 persen dari total APBD setelah dikurangi belanja gaji pokok ASN dan belanja untuk infrastruktur sebesar 28,80 persen dari total APBD setelah dikurangi belanja transfer sementara untuk alokasi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal hanya sebesar 4,82 persen dari total APBD.

3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah

Dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju telah diunggah dan dapat diunduh pada website Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju kecuali beberapa dokumen yang belum ditetapkan seperti LRA Audited, Opini BPK dan dokumen lainnya.

4. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran dari belanja operasional sebesar 84,13 persen dan belanja transfer sebesar 99,51 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 dan Untuk belanja modal sebesar 87,12 persen hal ini disebabkan terdapat beberapa belanja modal yang dianggarkan melalui APBD Perubahan Tahun 2024 sehingga waktu penyelesaian pekerjaan melampaui tahun berjalan yang berimplikasi pada rendahnya serapan anggaran.Sementara untuk belanja tidak terduga mencapai 35 persen.

5. Kondisi Keuangan Daerah

Pada kondisi keuangan daerah pemerintah kabupaten mamuju senantiasa menjaga kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya antara lain pada Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas jangka pendek, Solvabilitas jangka panjang, dan Solvabilitas Layanan, dalam mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif.

6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Pemerintah Kabupaten Mamuju dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk memberikan opini atas LKPD antara lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan perundang-undangan.

Sebagai laporan perbaikan data, kami laporakan bahwa dalam dokumen LAKIP Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 sebelumnya pada indikator IPKD menggunakan satuan 'Predikat' dan capaian 'BAIK'. Namun, dalam proses validasi data selanjutnya ditemukan bahwa satuan yang benar adalah 'Peringkat' dengan capaian 'Sangat Perlu Perbaikan / C'. sehingga di laporan ini dilakukan perbaikan pada satuan dan capaian indikator tahun 2023 dan melakukan validasi data secara menyeluruh agar data yang dihasilkan lebih valid dan diinterpretasikan dengan benar.

Sedangkan pada Indikator ketiga yaitu Nilai LPPD diuraikan bahwa Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 masih menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional. Namun, setelah

melakukan koordinasi secara lisan dengan Tim EKPPD Pusat dan hasil evaluasi tim EKPPD Provinsi dapat digambarkan capaian nilai LPPD kabupaten Mamuju Tahun 2024 adalah Sedang kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya Sangat Rendah. Meskipun belum sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah kabupaten Mamuju pada tahun 2024 yaitu 'Sangat Tinggi'.

Pemerintah kabupaten mamuju dalam rangka peningkatan nilai LPPD telah melakukan beberapa upaya dalam mencapai target tersebut yaitu melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengumpulan data IKK terkait penyusunan dokumen LPPD selanjutnya melakukan pendampingan langsung ke perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan LPPD, hal ini disebabkan kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya adalah kurangnya pemahaman SDM pelaksana di perangkat daerah dan keterlambatan dalam pelaporan data.

Untuk meningkatkan capaian indikator di masa mendatang, pemerintah kabupaten Mamuju akan mengambil beberapa langkah antara lain dengan melakukan analisis lebih dalam terhadap faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target, menyusun rencana aksi yang lebih komprehensif, meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dan peningkatan kompetensi SDM.

Tabel III.5
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	
			Target	Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	78,75	90	76,74	85,26
Rata-rata capaian					85,26	

Pada sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ini disebutkan realisasi pada tahun 2024 adalah 76,74 persen, dengan persentase capaian sebesar 85,26 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya sebesar 78,75 atau dengan

persentase capaian sebesar 87,50 persen hal ini terdapat penurunan yang tidak terlalu signifikan namun tetap menjadi suatu acuan bagi pemerintah Kabupaten Mamuju untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

secara umum masyarakat merasa puas dengan layanan publik yang diberikan oleh Kabupaten Mamuju Dengan nilai IKM sebesar 76,74 persen, dengan persentase capaian sebesar 85,26 persen, layanan di Kabupaten Mamuju ini sudah memenuhi standart yang diharapkan masyarakat, terutama dalam hal Biaya/Tarif, yang mencerminkan transparansi dan kewajaran biaya dalam pelayanan. Unsur waktu penyelesaian masih menjadi perhatian, yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap durasi layanan. waktu penyelesaian sering kali menjadi faktor yang paling dipermasalahkan dalam layanan publik di Kabupaten Mamuju. Tingkat kepuasan masyarakat sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara harapan dan kenyataan, Ketika waktu penyelesaian tidak memenuhi ekspektasi masyarakat, kepuasan mereka terhadap layanan jadi menurun. Oleh karena itu untuk meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan maka Kabupaten Mamuju perlu melakukan reformasi atau perbaikan maupun berinovasi dalam hal waktu penyelesaian layanan, misalnya dengan memperbaiki sistem antrean digital dan meningkatkan jumlah tenaga kerja pada jam-jam sibuk. Pada permasalahan ini maka penggunaan Aplikasi berbasis Komputer dalam pengolahan data terbukti mempercepat analisis data dan mengurangi kesalahan manusia dalam pengukuran IKM dapat meningkatkan effisiensi dan akurasi hasil.

Analisis Berdasarkan rata-rata capaian yang sebesar 85,26 persen, maka Sesuai dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan Kabupaten Mamuju berjalan dengan optimal, namun akan tetap dijadikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan. yang mana jika hal ini tidak ditangani maka akan berdampak pada hal-hal berikut ini :

- a. Rendahnya Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.
- b. Reputasi Kinerja yang lemah karena dianggap kurang berkualitas atau kurang relevan terhadap masyarakat.

beberapa pihak yang terdampak diantaranya :

- Masyarakat : kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai program studi, membuat mahasiswa yang pada prodi politik tidak paham secara mendalam terhadap jurusan yang dipilih.
- Petugas Pelayanan: Petugas akan terkendala dalam memenuhi beban kinerja karena rasio antara jumlah Aparat / Tenaga kerja pelayanan tidak sesuai dengan jumlah warga yang terlayani.
- Unit kerja : kurangnya penerapan Manajemen yaitu peran Petugas dalam melaksanakan pelayanan yang profesional diantaranya Pemahaman tentang kemudahan prosedur pelayanan, Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani, Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan, Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan serta Kemanan Pelayanan.

Evaluasi Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,14. Hasil nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.6
Nilai Rata-Rata (NRR) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 7 (Tujuh) Unsur Pelayanan

Kode Unsur	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	NRR Tertimbang
U1	Efektivitas pelayanan pengaduan SP4N-LAPOR	2,96	0,42
U2	Informatif tidaknya konten media Sosial resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju (Facebook & Instagram)	3,10	0,44
U3	Berita positif yang tersebar mengenai Pemerintah Kabupaten Mamuju	3,54	0,51
U4	Efektivitas informas keliling	2,94	0,42
U5	Kemudahan dalam menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	3,15	0,45
U6	Kepuasan dalam layanan pembuatan Kartu Mamuju Keren(KMK)	2,69	0,38
U7	Kepuasan atas layanan pembuatan Sub Domain Resmi Pemerintah	3,09	0,44
	Nilai Indeks		3,069
	Nilai SKM setelah dikonversi (NIx25)		76,74

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kabupaten Mamuju memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,069 atau 76,74. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kabupaten Mamuju masuk dalam kategori mutu pelayanan B atau Baik. Indeks Kepuasan tersebut merupakan komposit dari indeks 7 (Tujuh) unsur pelayanan yang ditanyakan, dengan nilai rata-rata unsur pelayanan berada pada angka 2,69 – 3,54.

Dari ketujuh unsur yang dinilai, semuanya masuk dalam kategori Baik seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Unsur efektivitas pelayanan pengaduan SP4N-LAPOR dengan nilai 2,96.
2. Unsur informatif tidaknya konten media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju (Facebook & Instagram) dengan nilai 3,09.
3. Unsur berita positif yang tersebar mengenai Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan nilai 3,54.
4. Unsur efektivitas informasi keliling dengan nilai 2,94.
5. Unsur kemudahan dalam menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dengan nilai 3,15.
6. Unsur kepuasan dalam layanan pembuatan Kartu Mamuju Keren (KMK) dengan nilai 2,69.
7. Unsur kepuasan atas layanan pembuatan *Sub Domain* Resmi Pemerintah dengan nilai 3,09.

Sesuai dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan Kabupaten Mamuju berjalan dengan optimal, namun akan tetap dijadikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Dapat kita simpulkan Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan untuk mengukur kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju, serta mengevaluasi pelayanan guna peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Kabupaten Mamuju sebesar 3,069 atau 76,74 dengan mutu pelayanan B atau mutu kinerja Baik.
2. Unsur-unsur pelayanan yang bemutu Baik adalah semua dari ketujuh unsur pelayanan yang ada di Kabupaten Mamuju, yaitu efektivitas pelayanan pengaduan SP4N-LAPOR; informatif tidaknya konten media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju (Facebook & Instagram); Berita positif yang tersebar mengenai Pemerintah Kabupaten Mamuju; efektivitas informasi keliling; kemudahan dalam menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE); kepuasan dalam layanan pembuatan Kartu Mamuju Keren (KMK); dan kepuasan atas layanan pembuatan Sub Domain Resmi Pemerintah.

Tabel III.7

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1 Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	72	70	78	111,43
2 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	68	70	82	117,14
Rata-rata capaian					114,28

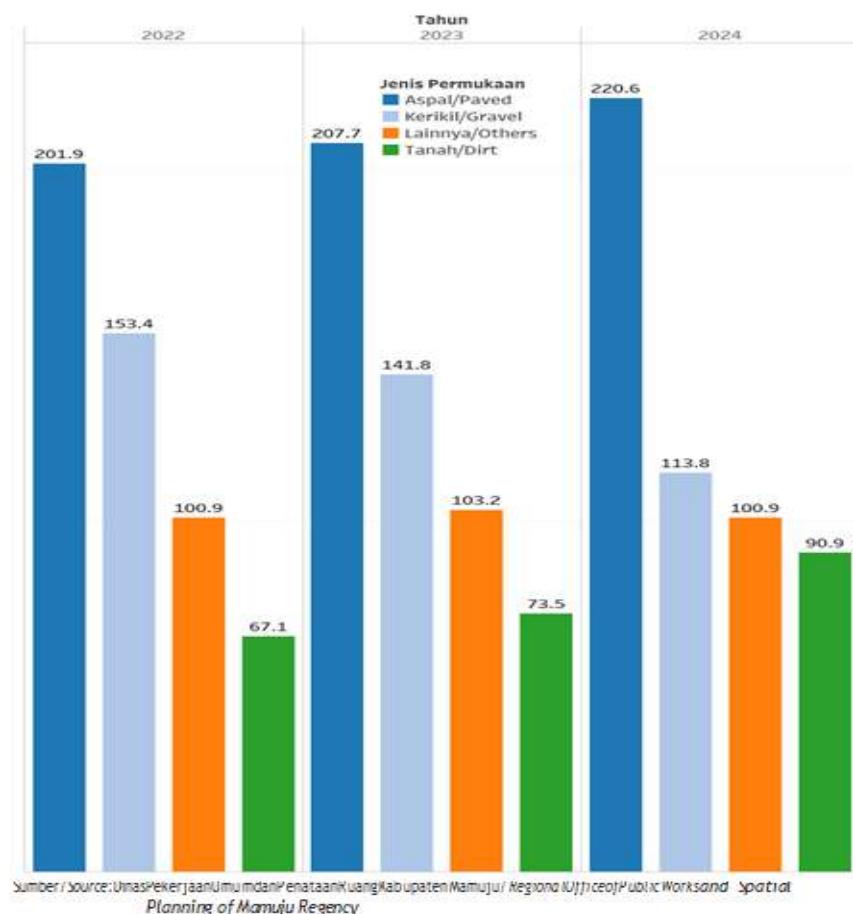
Pada 2024 untuk Sasaran Strategis 5 Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah, pada indikator pertama yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur. Kabupaten Mamuju lebih fokus pada Infrastruktur Jalan, Jembatan, Infrastruktur Pendukung kemandirian pangan, juga Fasilitas Infrastruktur. dimana tujuan tersebut untuk memprioritaskan peningkatan konektivitas antar wilayah, pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Dengan realisasi Indikator sebesar 78 persen dari target 70 persen atau disimpulkan capaian kinerja sebesar 111,43 persen.

Bila Dibandingkan pada Tahun sebelumnya Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Mamuju mengalami Peningkatan yang dimana hal tersebut dapat terlihat pada capaian realisasi pada tahun 2023 sebesar 72 persen dari target 60 persen, meningkat pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 78 persen dari target sebesar 70 persen.

diuraikan bahwa Jalan merupakan infrastruktur vital yang menunjang aktivitas perekonomian. Keberadaan jalan yang berkualitas berperan penting dalam mendukung pembangunan, terutama dalam mempermudah mobilitas penduduk serta memperlancar arus barang antar daerah.

Pada tahun 2024, panjang jalan di Kabupaten Mamuju mencapai 849,04 kilometer. Dari total tersebut, 114,52 kilometer berada di bawah wewenang negara, 208,35 kilometer di bawah wewenang provinsi, dan 526,17 kilometer di bawah wewenang kabupaten. Berdasarkan jenis permukaan, jalan beraspal sepanjang 220,55 kilometer, jalan berkerikil 113,83 kilometer, jalan tanah 90,93 kilometer, serta jalan dengan kategori lainnya mencapai 100,86 kilometer.

Grafik III.1
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Mamuju, 2022-2024



sedangkan pada indikator kedua yaitu Indeks Kepuasan Kualitas Layanan Infrastruktur dijelaskan bahwa pada tahun 2024 Indeks Kepuasan Kualitas Layanan Infrastruktur menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju.

Penilaian berdasarkan persepsi masyarakat yang dituangkan dan dianalisis secara kuantitatif. disebutkan pula realisasi atau capaian pada indikator kedua ini adalah sebesar 82 Persen atau dengan capaian sebesar 117,14 persen. perbandingan dengan tahun sebelumnya atau pada tahun 2023 terlihat jelas peningkatan Indeks Kepuasan Kualitas Layanan Infrastruktur yang dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 68 persen dari target 60 persen, sedangkan pada tahun 2024 didapatkan hasil persentase realisasi sebesar 82 persen dari target 70 persen.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju. Pengukuran akan dilakukan secara agregat per-jenis infrastruktur sehingga kelemahan maupun kelebihan suatu Program/Kegiatan dapat diidentifikasi.

Tabel III.8
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	77,64	80	74,66	93,32
2 Indeks Resiko Bencana	Predikat	Tinggi	Sedang	Sedang	100
Rata-rata capaian					96,66

Untuk indikator sasaran satu Indeks Kualitas Lingkungan hidup pada Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup. Mendasari Rancangan RPJMN bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. terdapat strategi yang akan dilakukan yaitu berupa penguatan sistem pemantauan kualitas

lingkungan hidup; penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup dan penyempurnaan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

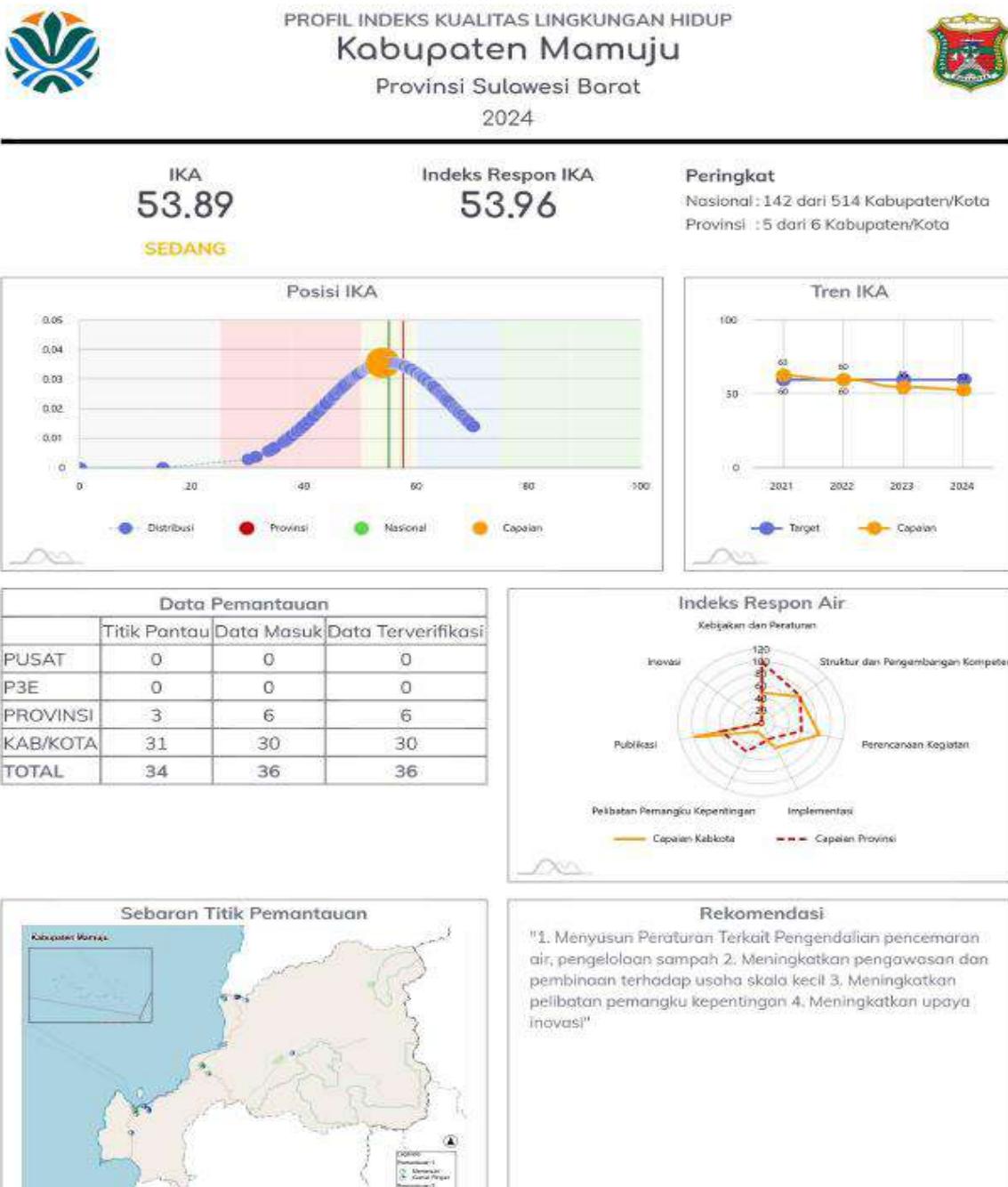
Pada kabupaten Mamuju ditahun 2024 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 93,32 persen berdasarkan Realisasi Indikator Sasaran sebesar 74,66 persen diperbandingkan dengan Target sebesar 80,00 persen.

Berdasarkan Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Mamuju Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel III.9
Perbandingan Target dan Capaian IKLH Kabupaten Mamuju tahun 2024

No	Jenis Indeks	Target	Capaian	Kriteria	Keterangan
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	60,3	53,89	Sedang	Belum memenuhi target
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,79	88,96	Baik	Memenuhi target
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	85,11	83,88	Baik	Belum memenuhi target
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,68	77,64	Baik	Belum memenuhi target

Gambar 3.1
Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju tahun 2024





PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat
2024

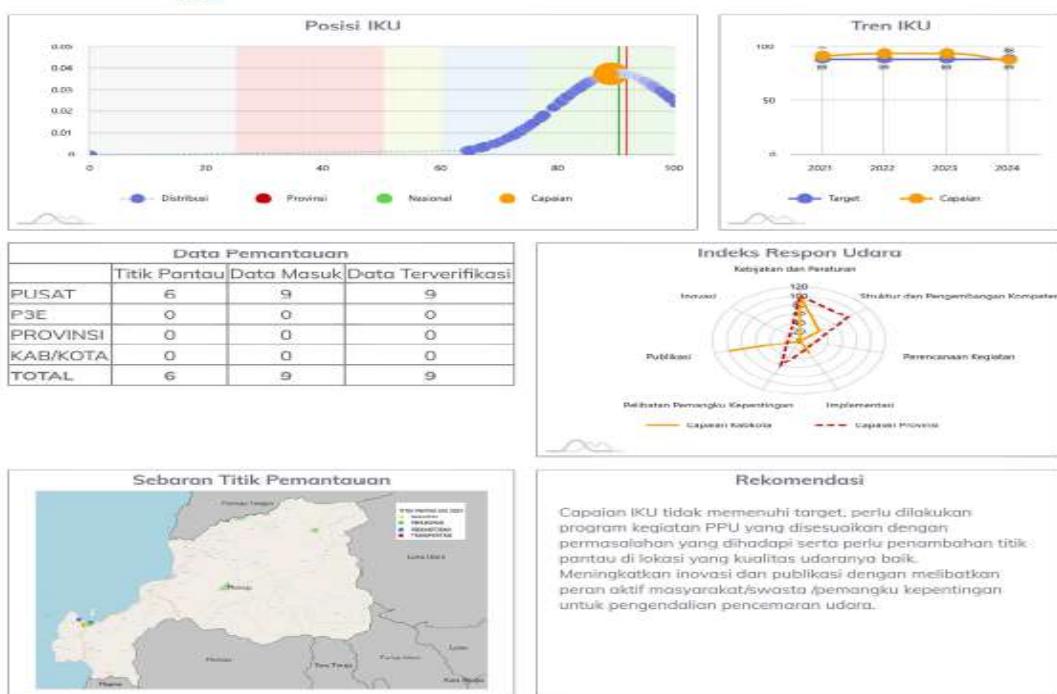


**IKU
88.96**

BAIK

**Indeks Respon IKU
35.79**

Peringkat
Nasional: 308 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 6 dari 6 Kabupaten/Kota



PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat
2024

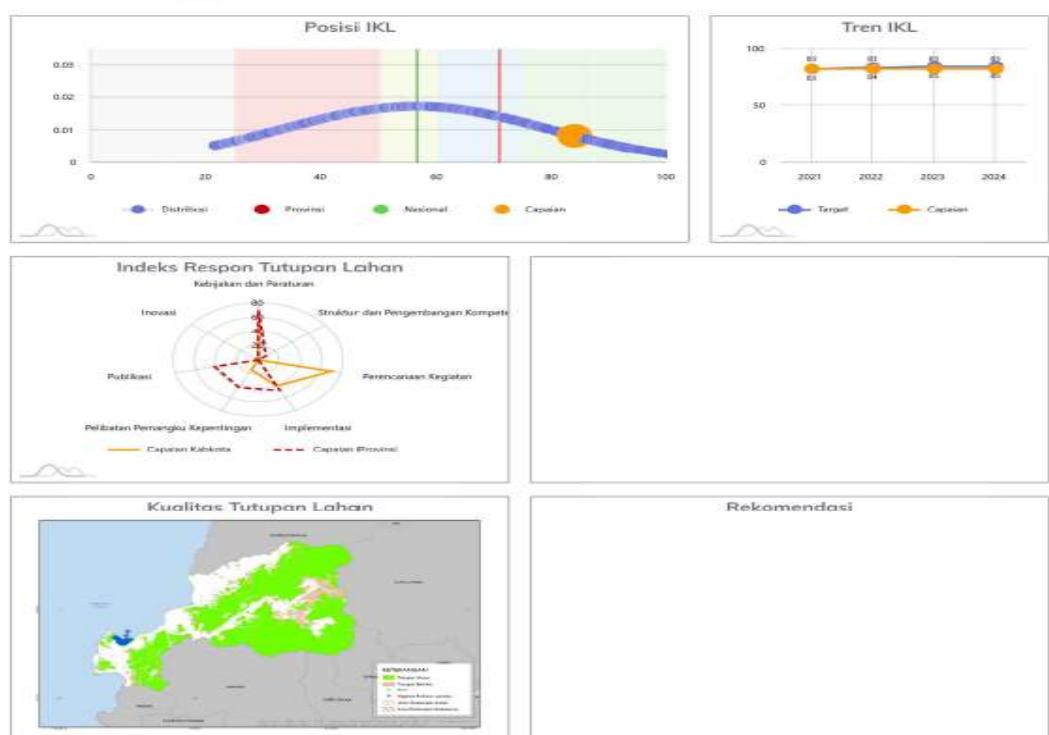


**IKL
83.88**

BAIK

**Indeks Respon IKL
33.00**

Peringkat
Nasional: 51 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 1 dari 6 Kabupaten/Kota





PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat
2024



Kepala Daerah: Hj. Siti Sutinah Suhardi, SH, M.Si.
Luas Wilayah : 4979.89 Km²
Populasi : 292395 Jiwa

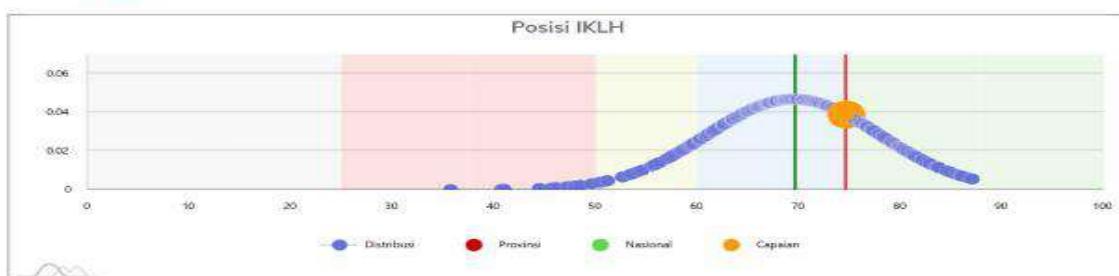
Kepala DPRD : Azwar Anshari Hobsi
Kategori Daerah : TIDAK TERTINGGAL
Pendapatan Per Kapita : -

IKLH
74.66

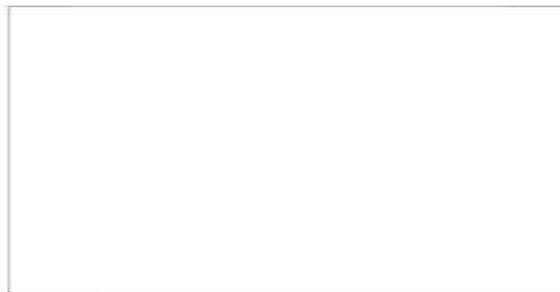
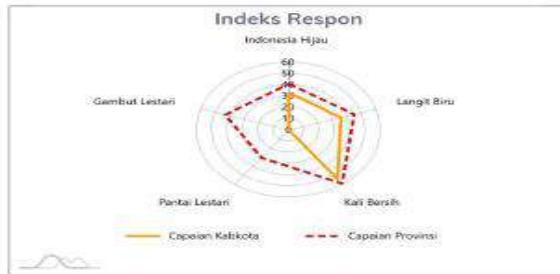
BAIK

Indeks Respon
31.91

Peringkat
Nasional : 127 dari 514 Kabupaten/Kota.
Provinsi : 4 dari 6 Kabupaten/Kota.



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	6	9	9
AIR	34	36	36
LAHAN	0	1	1
TOTAL	40	46	46



Dari gambar Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diatas maka dapat diuraikan bahwa :

1. Capaian IKLH kabupaten Mamuju termasuk dalam kategori baik dan menempati peringkat nasional : 127 dari 514 kabupaten/kota, dan peringkat : 4 dari 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat,
2. Beberapa catatan terkait dengan capaian IKLH kabupaten Mamuju tahun 2024 :
 - a. Tidak tercapainya nilai IKA dikarenakan air sungai yang menjadi titik sampel telah masuk dalam kategori "camar ringan".
Jumlah sungai yang menjadi sampel sebanyak 10 (sepuluh) sungai, dan dari masing-masing sungai diambil 3 (tiga) titik sampel yang mewakili titik hulu,

tengah dan hilir sungai. Berdasarkan hasil uji laboaratorium terhadap sampel 10 air sungai dari masing-masing titik sampel diketahui bahwa untuk parameter Biochemical Oxygen Demand (BOD) pada seluruh sungai yang dipantau, diketahui nilai hasil uji seluruh sungai telah melebihi standar baku mutu air sungai. Selain itu, untuk paramater Total Suspended Solid (TSS) pada 10 sungai yang dipantau, terdapat 6 (enam) sungai dengan nilai hasil uji telah melebihi standar baku mutu air sungai. Begitu pula dengan parameter Chemical Oxygen demand (COD) dari 10 sungai yang dipantau, 5 sungai diantaranya untuk nilai COD telah melebihi standar baku mutu air sungai.

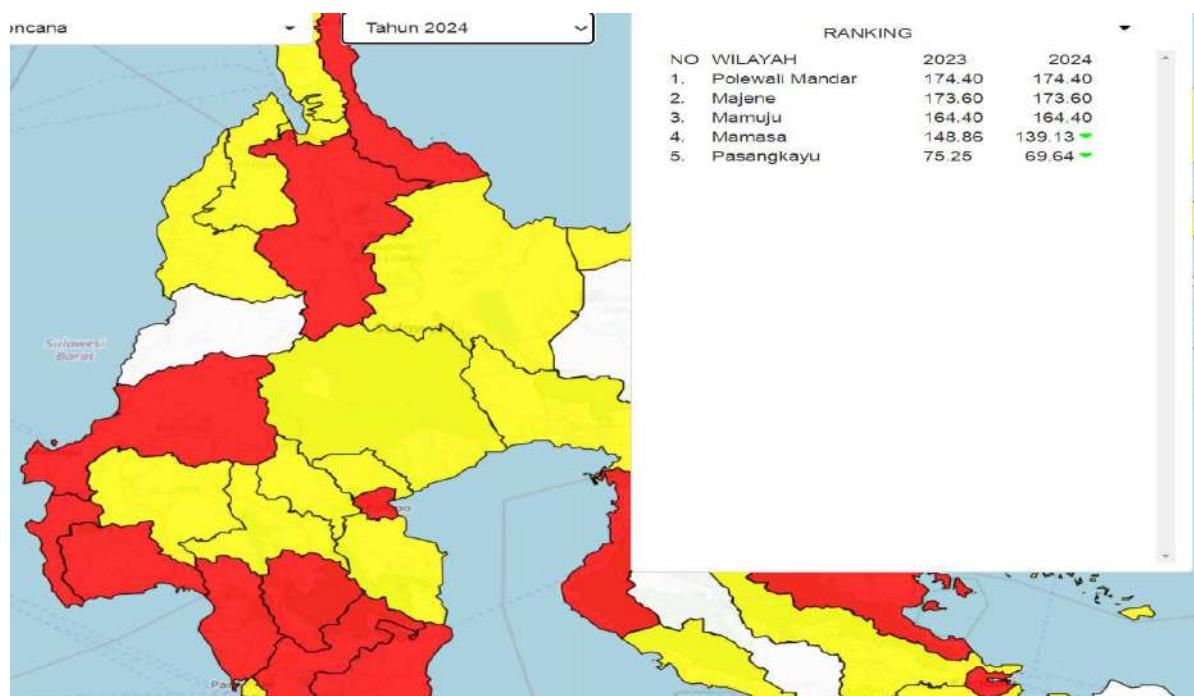
- b. Untuk memastikan faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi nilai hasil uji air limbah melebihi standar baku mutu perlu penelitian lebih lanjut. Secara hipotetik, nilai BOD, COD dan TSS yang melebih baku mutu dapat disebabkan oleh cemaran air limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai, cemaran limbah pertanian seperti pupuk, pestisida, ; atau terjadinya perubahan alamiah seperti erosi, pada daerah2 tertentu pada bagian sungai,
 - c. Untuk Parameter Indeks Kualitas Lahan, juga masih belum memenuhi target, dikarenakan belum adanya produk hukum daerah yagn mengatur tentang penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kabupaten Mamuju. Kondisi ini menyulitkan untuk mementukan luasan kawasan RTH kabupaten Mamuju. Selain itu, keterbatasan sumber data dukung seperti peta kawasan tutupan lahan terbaru juga mempengaruhi kemampuan untuk identifikasi kawasan RTH Mamuju
 - d. Untuk Parameter indeks kualitas udara telah memenuhi target yang ditetapkan, untuk itu perlu dipertahankan dengan mengurangi perubahan fungsi lahan, khususnya kawasan hutan dan RTH serta Sabuk Hijau (*Green belt*)kabupaten Mamuju, sehingga kemampuan tegakan hutan, RTH serta sabuk hijau dalam mengurangi polusi tidak berkurang.
3. Untuk perbaikan IKLH kabupaten Mamuju kedepan, adalah perlunya melakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui faktor- faktor penyebab parameter air sungai melebih baku mutu. Data tersebut penting sebagai acuan untuk formulasi kebijakan perbaikan kualitas air sungai sekaligus mnjaga kualitas air sungai semakin

baik. Kualitas air sungai yang baik sangat penting untuk mendukung kualitas hidup yang baik bagi setiap rumah tangga.

4. Perlu penguatan kebijakan hukum terkait dengan penetapan kawasan RTH. Hal ini penting untuk mengetahui apakah luasan RTH kabupaten Mamuju telah sesuai dengan standar yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan juga sekaligus untuk mencegah perubahan fungsi kawasan RTH.

Pada indikator kedua dijelaskan bahwa Pada Tahun 2024 indikator Indeks Resiko Bencana di kabupaten mamuju mendapatkan predikat Sedang, hal ini berbanding lurus dengan Target Daerah dengan Status Predikat Sedang dengan realisasi Status Predikat Sedang atau dengan hasil capaian Kinerja 100 persen.

Gambar 3.2
Peta Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2024



Sumber Data : InaRISK

Prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah menurunkan tingkat risiko bencana dan meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan dan tindakan-tindakan untuk penanggulangan bencana. Pada dasarnya, penerapan kebijakan dan tindakan tersebut membutuhkan kerjasama multi

pihak dari pemerintah daerah, instansi dan elemen yang terkait. Optimalitas upaya penanggulangan bencana tersebut perlu disinkronisasi dengan kebijakan tingkat nasional.

Dalam Upaya penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Mamuju merumuskan berdasarkan hasil analisis tingkat ketahanan daerah terhadap bencana yang telah disesuaikan dan disepakati pada RENAS PB dalam 7 (tujuh) kelompok kegiatan. Penyusunan program kegiatan tersebut dilihat dari kondisi daerah yang perlu ditingkatkan yang dituangkan serta rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan untuk pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih sistematis.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang tertuang didalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024, bahwa strategi yang digunakan untuk penurunan indeks risiko bencana adalah meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana dengan melaksanakan 71 indikator ketangguhan yang dikelompokkan menjadi 7 prioritas yang terdiri dari :

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan
 - a. Perda tentang PB
 - b. Pembentukan BPBD
 - c. Pembentukan forum PRB
 - d. Peraturan tentang penyebaran Info PB
 - e. Kebijakan daerah tentang RPB
 - f. Perda tentang tata ruang berbasis PRB
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
 - a. Peta bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
 - b. Peta kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
 - c. Peta kapasitas dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
 - d. Rencana penanggulangan bencana
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
 - a. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
 - b. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
 - c. Komunikasi bencana lintas lembaga

- d. Pusdal ops PB
 - e. Sistem pendataan bencana
 - f. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
 - g. Penyelenggaraan Gladi PB
 - h. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik bencana
 - i. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik bencana
 - j. Penyimpanan / gudang logistik
 - k. Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara priodik
 - l. Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
 - a. Penataan ruang berbasis PRB
 - b. Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
 - c. Sekolah/Madrasah aman bencana
 - d. Rumah sakit / puskesmas aman bencana
 - e. Desatangguh bencana
 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
 - a. Penerapan resapan air untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir
 - b. Perlindungan daerah tangkapan air
 - c. Restorasi Sungai
 - d. Penguatan Lereng (Termasuk tindakan sipil teknis di kawasan DAS rawan longsor)
 - e. Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
 - f. Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
 - g. Pemantauan berkala hulu sungai
 - h. Penerapan Bangunan Tahan Gempa bumi
 - i. Tanaman dan / atau bangunan penahan gelombang tsunami
 - j. Revitalisasi tanggul,embung,waduk dan taman kota
 - k. Restorasi lahan gambut
 - l. Konservasi vegetatif DAS rawan longsor

6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
 - a. Rencana Kontijensi perancaman
 - b. Sistem Peringatan Dini perancaman
 - c. Jalur dan tempat evakuasi sementara
 - d. Penentuan status tanggap darurat
 - e. Penerapan sistem komando operasi darurat
 - f. Pengerahan Tim Kaji Cepat kelokasi bencana
 - g. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban
 - h. Perbaikan Darurat
 - i. Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh
 - j. Penghentian status Tanggap Darurat Bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana
 - a. Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
 - b. Pemulihan infrastruktur penting
 - c. Perbaikan rumah penduduk
 - d. Pemulihan Penghidupan Masyarakat

Tabel III.10

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	69,61	68,70	71,86	104,59
2	Indeks Pendidikan	Skala	0,64	0,42	0,64	152,38
3	Indeks Kesehatan	Skala	0,748	0,578	0,802	138,75
4	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	10,075	32.500	10.440	32,12

5	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	60,59	59,87	60,96	101,82
6	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	53	65	77	118
Rata-rata capaian						107,94

Pada Indikator pertama pada sasaran Strategis ini Indeks Pembangunan Manusia dijelaskan bahwa Capaian kualitas hidup tercermin melalui IPM. Tahun 2023, capaian IPM Kabupaten Mamuju sebesar 71,86. Capaian Kinerja indikator ini sebesar 104,59 yang dimana realisasi Indikator sebesar 71,86 melebihi dari target sebesar 68,70.

Apabila diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 di kabupaten mamuju terjadi peningkatan sebesar 2,22 digit dimana disebutkan pada tahun sebelumnya sebesar 69,64 meningkat menjadi 71,86.

Berdasarkan analisa maka dipaparkan bahwa Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, adapun beberapa dimensi yang dimaksudkan adalah Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat dimana Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, Dimensi pengetahuan dimana pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, selain itu adapula Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Indonesia mencapai 12,34 juta rupiah per tahun.

Maka disimpulkan bahwa Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. dimana pada dimensi pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 10,440 dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,29 persen. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,35 Demikian juga pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sebesar 72,13

Indikator kedua pada sasaran Strategis ini hasil capaian Kinerja pada Indeks Pendidikan ini sebesar 152,38 persen, yang dimana hasil tersebut didapatkan dari realisasi indikator sebesar 0,64 dengan besaran target sebanyak 0,42 persen.

Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan capaian kinerja yang persentase pada tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 177,77 Persen.

Dari hasil analisa Indeks Pendidikan adalah komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang diterbitkan setiap tahun oleh Program Pembangunan PBB. Selain indikator Ekonomi dan Indeks Harapan Hidup, membantu mengukur pencapaian pendidikan, GNI (PPP) per kapita dan harapan hidup juga digunakan dengan indeks pendidikan untuk mendapatkan IPM masing-masing negara. Sejak 2010, indeks pendidikan telah diukur dengan menggabungkan rata-rata lama sekolah orang dewasa dengan tahun sekolah yang diharapkan untuk siswa di bawah usia 25 tahun.

Pendidikan dianggap sebagai jantung dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pendidikan telah dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan hak yang memungkinkan. Untuk memenuhi hak ini, negara-negara harus memastikan akses yang sama secara universal terhadap pendidikan dan pembelajaran berkualitas yang inklusif dan setara, yang harus gratis dan wajib, tanpa meninggalkan siapa pun terlepas dari jenis kelamin, disabilitas, situasi sosial dan ekonomi mereka.

Untuk menghadapi kompleksitas kondisi kehidupan masyarakat dikabupaten Mamuju, peserta didik tidak cukup dibekali dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau lebih dikenal dengan sebutan “Tree R” (reading, writing, arithmetic), tetapi juga perlu dibekali kompetensi masyarakat global atau juga disebut kecakapan abad 21, yakni kemampuan berkomunikasi, kreatif, berpikir kritis, dan berkolaborasi atau dikenal dengan sebutan “Four Cs”, yaitu communicators, creators, critical thingkers, and collaborators.

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review diperoleh berbagai penerjemahan kunci terkait kualitas pendidikan sebagai bentuk layanan pendidikan yang inklusif sebagaimana berikut:

1. Kualitas layanan pendidikan diukur meliputi kualitas sumber daya manusia termasuk kompetensi pedagogi, keberpihakan negara dalam menyediakan regulasi dan

- infrastruktur serta akses biaya, capaian dan capaian lanjutan peserta pendidik,
2. Layanan pendidikan menginterpretasikan perkembangan teknologi sebagai kualitas dialog dan media pembelajaran,
 3. Kualitas layanan pendidikan memiliki dimensi infrastruktur, suprastruktur, dan interstruktur yang merupakan kolaborasi antara institusi kependidikan,
 4. Kualitas pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang setara untuk setiap gender dengan memastikan keberpihakan pemerintah dalam memberikan akses.

Disimpulkan bahwa Hasil pengukuran indeks pendidikan Kabupaten Mamuju Tahun 2024 mencapai Skala 0,64 dari target ditahun 2024 sebesar 0,42 capaian indikator ini sama dengan capaian tahun sebelumnya,dengan mengadopsi kriteria Indeks Pembangunan Manusia, maka capaian ini dapat diinterpretasikan tinggi.

Pada Indikator ketiga pada sasaran Strategis yakni Indeks Kesehatan ini dijelaskan Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya.

Realisasi dari Indeks Kesehatan sebesar 0,802 dari target 0,578 dengan kata lain capaian kinerja sebesar 138,75 atau dengan kategori sangat baik.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi Indeks Kesehatan dengan skala 0,748 dari target skala 0,556 dengan capaian kinerja sebesar 134,53. dari hasil angka tersebut kita dapat melihat terdapat peningkatan meskipun belum signifikan.

Analisis Indikator Indeks Kesehatan sangat diperlukan, meskipun angka kematian di Mamuju termasuk rendah indeks kesehatan dapat mengembangkan pengetahuan tentang dampak kebijakan dan program terhadap kesehatan serta meningkatkan fokus dan efektifitas suatu intervensi dengan mengidentifikasi suatu kebutuhan khusus di sektor kesehatan.

Penyediaan data yang berkualitas memegang peran penting dalam pembangunan yang berkelanjutan termasuk di bidang kesehatan. Data kesehatan yang akurat dan komprehensif menjadi landasan yang kuat untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan kesehatan berbasis bukti. Data dan informasi kesehatan yang komprehensif akan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang profil kesehatan masyarakat, termasuk

determinan sosial ekonomi yang memengaruhi kesehatan serta kelompok-kelompok masyarakat yang perlu menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Terkait hal tersebut pemerintah kabupaten mamuju akan mengoptimalkan penguatan data sektor, sehingga dengan data yang handal, pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan.

Dengan populasi yang terus bertambah, tantangan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Tantangan kesehatan seperti aksesibilitas layanan kesehatan, pemberian vaksin, dan upaya pencegahan penyakit menjadi semakin kompleks. Kondisi geografis dan distribusi usia penduduk sangat menentukan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang perlu dibangun oleh pemerintah. Masyarakat yang menua memerlukan pelayanan kesehatan lanjut usia yang lebih intensif, sementara populasi muda memerlukan fokus pada pencegahan dan pemeliharaan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang demografi penduduk menjadi kunci dalam perencanaan kebijakan kesehatan yang efektif. Melalui analisis demografi, pemerintah kabupaten mamuju dapat mengarahkan investasi dan sumber daya ke sektor kesehatan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap tahap siklus kehidupan. Dengan memahami hubungan antara demografi penduduk dan kesehatan masyarakat, daerah kabupaten mamuju dapat mengembangkan strategi kesehatan yang berkelanjutan dan berfokus pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran kesehatan OOP merupakan pengeluaran yang benar-benar dilakukan oleh rumah tangga untuk pelayanan kesehatan, termasuk biaya konsultasi dokter, pembelian obat, retribusi pelayanan kesehatan, pengobatan alternatif/tradisional, uang gratifikasi atau pembayaran ke praktisi kesehatan atau fasilitas kesehatan, baik yang dikeluarkan secara tunai maupun menggunakan kartu debet, kredit, atau uang yang berasal dari pinjaman/hutang. Sementara itu, pengeluaran total untuk kesehatan meliputi seluruh pengeluaran kesehatan termasuk yang dibayarkan oleh pihak ketiga seperti asuransi kesehatan (termasuk Jaminan Kesehatan Nasional/JKN), keluarga, tetangga, teman, kantor, atau pihak lainnya.

Biaya pelayanan pengobatan/kuratif mencakup pengeluaran yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas kesehatan terjaga seoptimal mungkin. Dalam Susenas, biaya pelayanan pengobatan/kuratif ini mencakup pengeluaran untuk pengobatan di RS pemerintah, RS swasta, puskesmas/pustu/polindes/posyandu, praktik dokter/poliklinik, praktik petugas kesehatan (bidan/perawat/mantri Kesehatan), praktik pengobatan tradisional, dan dukun penolong persalinan.

Disimpulkan bahwa dengan Data ini menunjukkan Daerah harus mengatasi kesenjangan cakupan intervensi dan mempercepat kemajuan dalam meningkatkan cakupan dan hasil kesehatan, khususnya dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Indikator keempat pada sasaran Strategis yakni Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli) Pada tahun 2023 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli) sebesar 10,440 Ribu Rupiah/ Orang/Tahun yang dimana hal tersebut masih dibawah dari target daerah sebesar 32.500 Ribu Rupiah/ Orang/Tahun. Dengan kata lain bahwa Capaian Kinerja pada indikator ini sebesar 32,12 persen.

dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada indikator ini terdapat penurunan capaian yang signifikan, yang dimana hal tersebut sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi di daerah dan masyarakat itu sendiri. dimana pada tahun sebelumnya daerah memberikan target sebesar 24,000 dengan realisasi hanya sebesar 10,075 dan target tersebut naik menjadi 32,500 dengan realisasi hanya sebesar 10,440. Tetapi dapat dilaporkan bahwa capaian untuk realisasi kondisi tahun 2023 yaitu 10,075 meningkat di tahun 2024 sebesar 10,440.

Analisis lebih dalam mengungkapkan bahwa meskipun faktor ini berkontribusi pada penurunan indeks harga konsumen (IHK), angka deflasi yang signifikan ini merupakan bukti nyata dari melemahnya daya beli masyarakat. Melemahnya kelas menengah ini tak hanya berdampak pada konsumsi, tetapi juga berimbas pada pelambatan sektor usaha yang bergantung pada belanja domestik.

“Kelas menengah memiliki kecenderungan belanja lebih tinggi dari kelas atas, tetapi dengan pendapatan yang lebih stabil dibanding kelas bawah. salah satu penyebab melemahnya daya

beli adalah ketidakpastian kebijakan ekonomi pemerintah, ketidakpastian yang ditimbulkan memengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menyusut dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024, indeks penjualan ritel yang terus menurun sejak kuartal III-2024 menunjukkan bahwa konsumen semakin mengurangi pengeluarannya.

Tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan energi global, juga semakin menekan margin keuntungan usaha. Akibatnya, beberapa usaha kecil dan menengah (UKM) terpaksa melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Beberapa di antaranya terpaksa menutup usaha, sementara yang lain harus melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja. Fenomena ini menimbulkan efek domino, di mana meningkatnya angka pengangguran semakin memperburuk daya beli masyarakat.

Untuk mengatasi pelemahan daya beli masyarakat, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan adalah :

1. penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui insentif bagi industri padat karya.
2. penguatan program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi bahan pokok yang lebih tepat sasaran.
3. pengendalian harga komoditas strategis dengan memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Penyederhanaan regulasi di tingkat kabupaten dan peningkatan insentif investasi di tingkat pusat dapat menarik lebih banyak modal asing dan domestik untuk mempercepat pertumbuhan industri. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja baru dapat dipercepat dan daya beli masyarakat dapat diperbaiki secara berkelanjutan di wilayah kabupaten mamuju.

Indikator kelima pada sasaran Strategis yakni Indeks Pemberdayaan Gender disebutkan bahwa Dalam Dua tahun terakhir, IDG Kabupaten Mamuju menunjukkan peningkatan

berdasarkan rilis data BPS pada bulan Februari ditahun 2025 untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan data pada tahun 2023 di Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 60,96%. bila dibandingkan dengan target sebesar 59,87 persen maka didapatkan capaian kinerja sebesar 101,82 persen. Sedangkan capaian ini meningkat dari realisasi kondisi tahun 2023 yaitu sebesar 60,59 persen.

Perbandingan dengan tahun sebelumnya untuk capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mamuju disebutkan sebesar 60,59 persen yang mana terdapat peningkatan sekitar 0,37 Persen. IDG adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Analisa pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia makin membaik dari tahun ke tahun. Hal ini berarti, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan untuk berkecimpung di bidang ekonomi dan politik serta terlibat dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan kian menipis. Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, Kabupaten Mamuju mendasari empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Di samping itu, langkah strategis disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender.

Skor IDG diperoleh dari hasil pengukuran melalui tiga dimensi, yaitu dimensi keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan di parlemen menilik proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif.

Dimensi pengambilan keputusan didasarkan pada proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai manajer, staf administrasi, pekerja profesional, dan teknisi. Terakhir, dimensi distribusi pendapatan dinilai dari upah buruh laki-laki dan perempuan di sektor non-pertanian.

Pada Indikator keenam yakni Indeks Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa realisasi pada tahun 2024 adalah 77 persen dengan persentase capaian sebesar 118 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yaitu 43 persen atau dengan persentase capaian

sebesar 88 persen hal ini terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya yang menggambarkan adanya peningkatan realisasi kinerja pemerintah Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan formulasi pada Indeks Kesejahteraan Sosial berasal dari 40 persen persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 30 persen Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 30 persen Persentase PSKS yang aktif.

Dijelaskan bahwa PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial yaitu penerima PKH 8.739 jiwa, penerima BNPT 16.324 jiwa, BPJS PBPU Pemda 91.997 jiwa, korban bencana alam 1.141 jiwa, dan Korban Bencana Sosial sebanyak 97 jiwa. Sehingga total mencapai 117.157 jiwa. PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi sosial 118 orang yang terdiri dari Layanan permakanan 45 orang, Layanan kesehatan 20 orang dan Layanan pendidikan 53 orang. PSKS yang aktif sebanyak 106 orang terdiri atas pendamping PKH 28 orang, pendamping TKSK 11 orang, pekerja sosial 4 orang, tagana 36 orang dan karang taruna 27 orang.

Dari hasil data indeks kesejahteraan sosial evaluasi yang dilaksanakan kabupaten mamuju dalam rangka pencapaian sosial yaitu mempertimbangkan dimensi kesejahteraan sosial objektif yaitu meningkatkan pelayanan akses ke masyarakat sedangkan untuk sosial subjektif pada peningkatan umur harapan hidup masyarakat selain itu juga pada penanganan pada kelompok rentan.

Tabel III.11
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	99,57	100	99,65	99,65
2	Indeks Kriminilitas	Persen	99,57	100	99,65	99,65
Rata-rata capaian					99,65	

Pada tahun 2024 untuk Sasaran Strategis 6 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum mencakup 2 (dua) Indikator yang mendukung dalam Pencapaiannya yakni Indikator Indeks ketentraman dan ketertiban dan Indikator Indeks Kriminalitas.

Dalam pencapaian Kinerja dua indikator sasaran Strategis ini masing-masing memperoleh hasil sebesar 99,65 persen, yang dimana ditahun 2024 tingkat kejahatan di Mamuju cenderung rendah. Hal ini dapat tercermin dari persentase penduduk yang mengalami korban kejahatan hanya sekitar 0,35 persen. Capaian ini tentunya menggembirakan karena sebagai ibukota provinsi, Mamuju masih tergolong dalam wilayah aman.

pada tahun 2024 tingkat kejahatan di Kabupaten Mamuju mengalami penurunan. Hal ini dapat tercermin dari persentase penduduk yang mengalami korban kejahatan yang menjadi sekitar 0,35 persen pada tahun 2024, yang mana sebelumnya pada tahun 2023 sekitar 0,43 persen. Capaian ini tentunya menggembirakan karena sebagai ibukota provinsi, Mamuju masih tergolong dalam wilayah aman. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dengan runtun waktu 2023-2024, penduduk laki-laki mengalami penurunan, sedangkan penduduk perempuan mengalami peningkatan. Hal ini perlu perhatian pemerintah untuk memperkuat keamanan agar penduduk perempuan lebih nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Analisa pada indikator ini diuraikan bahwa Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari daya kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, bencana. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total. Manusia tidak pernah dapat terlindungi sepenuhnya dari bencana alam tiba-tiba, seperti banjir atau perilaku berbahaya orang lain.

Tabel III. 12
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 meningkatnya pertumbuhan
sektor- sektor unggulan daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks Gini	Persen	0,37	0,25	0,425
2	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,37	5.5-5.6%	6,47
Rata-rata capaian					86,16

Sasaran Strategis 7 Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah pada indikator pertama yakni Indeks Gini diuraikan Pada tahun 2024 Indeks Gini di Kabupaten Mamuju mencapai realisasi sebesar 0,425 persen dari target 0,25 persen dengan kata lain capaian Kinerja dari Indikator Indeks Gini pada tahun 2024 sebesar 58,82 persen yang dimana indeks gini digunakan untuk mengetahui Ketimpangan pendapatan yang merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata.

Jika dilihat dari rasio ketimpangan pendapatan, pada tahun 2024 gini rasio di kabupaten mamuju sebesar 0,425 persen. Masih tergolong moderat, namun pemerintah tetap memberi perhatian intensif terhadap masalah ketimpangan. Penurunan ini didukung dengan data lain seperti tingkat kedalaman dan keparahan. Pada tahun yang sama, tingkat kedalaman kemiskinan di kabupaten mamuju sebesar 0,79, membaik dibandingkan tahun 2023 sebesar 0.98. Sementara itu untuk tingkat keparahan angkanya mencapai 0,13 atau turun 0,05 dibandingkan tahun 2023. Kedua angka tersebut memberikan gambaran umum tentang kondisi masyarakat miskin yang semakin mengelompok dan relatif homogen dalam hal variasi pengeluarannya. Informasi ini membuat penentuan strategi penanggulangan dan penanganan kemiskinan menjadi lebih mudah karena karakteristik subjek yang akan ditangani memiliki ciri yang hampir sama. Artinya target penanganan melalui program pemerintah akan lebih terarah.

Pada Indikator kedua Yaitu Pertumbuhan Ekonomi disebutkan bahwa berdasarkan Data Mamuju Dalam Angka Tahun 2025, untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju ditahun 2024 mencapai realisasi 6,47 persen dari target Indikator Sebesar 5,6-5,7 persen atau dengan kata lain Capaian Kinerja sebesar 113,50 persen. bila dibandingkan dengan lima (5) Kabupaten lain di sulawesi Barat, maka Kabupaten Mamuju menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan capaian tersebut mampu mengalahkan dari capain Provinsi Sulawesi Barat itu sendiri dengan jumlah capai pertumbuhan ekonomi ditahun 2024 sebesar 4,76 persen

Tabel III.13
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat (persen) ,2021–2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Majene	2,13	2,38	5,29	5,30
Polewali Mandar	1,87	3,58	4,56	5,94
Mamasa	2,00	1,79	3,36	3,26
Mamuju	2,35	3,28	4,47	6,47
Pasangkayu	3,78	-0,02	6,78	0,68
Mamuju Tengah	3,26	2,34	2,77	2,98
Sulawesi Barat	2,57	2,26	5,23	4,76

Sumber data : Mamuju Dalam Angka, 2025

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Sulawesi Barat mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2024, dengan beberapa tahun mengalami kontraksi dan beberapa tahun lainnya mengalami pertumbuhan positif. Meskipun demikian, secara keseluruhan, terdapat tren positif dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang cenderung meningkat selama periode tersebut. Pasangkayu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup variatif, termasuk tahun dengan pertumbuhan negatif yang signifikan pada tahun 2020, namun menunjukkan pemulihan yang kuat pada tahun 2024.

Angka tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju tahun 2024 adalah sekitar 6,47 persen. Pada tahun 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap yang memberikan kontribusi

terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Mamuju. Sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 39,5 persen. yang dimana Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 nampak menguat dibandingkan tahun 2023 yakni naik sekitar 2 persen poin.

dari uraian PDRB diatas dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB merupakan nilai secara keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat/warga dalam suatu wilayah dalam waktu tertentu (1tahun). PDRB juga merupakan sebagai ukuran laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

selain itu juga Koperasi memegang peranan penting sebagai alternatif lembaga keuangan yang efektif untuk menjangkau kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Koperasi merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan seluruh anggotanya.

Peningkatan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundingan terkait dengan pajak dan retribusi.

Dengan adanya penerimaan PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Peningkatan PAD menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai

tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRB nya dari tahun ke tahun.

Tabel III.14
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya investasi daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1 Pertumbuhan Investasi	Persen	68,27	15	45,04	300,26
Rata-rata capaian					300,26

Pada Sasaran Strategis 8 Indikator Pertumbuhan Investasi Tahun 2024 di Kabupaten Mamuju tercatat bahwa Realisasi Pertumbuhan Investasi sebesar 45,04 persen dari target 15 persen atau dengan kata lain Capaian Kinerja sebesar 300,26 persen. tetapi dapat dilaporkan pertumbuhan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan investasi di tahun 2023 yang dimana realisasi di tahun 2023 sebesar 68,27 persen.

Yang dimana merujuk pada Formulasi Penilaian Pertumbuhan Investasi yakni dengan menggunakan rumus CAGR dengan uraian Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Rp) Tahun 2023 Sebesar Rp. 696,827,923,282,- sampai dengan Tahun 2024 Sebesar Rp. 1,010,677,136,227,-. Sehingga diperoleh capaian Kinerja pada Pertumbuhan Investasi Sebesar 300,26 persen.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebutkan bahwa Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan dimana telah disebutkan diatas bahwa pada tahun 2023 nilai investasi daerah sebesar Rp. 696,827,923,282,- meningkat pada Tahun 2024 Sebesar Rp. 1,010,677,136,227,-

Analisa dari Pertumbuhan Investasi ini diuraikan bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). hal tersebut dapat terjadi disebabkan bertambahnya Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari 73

Perusahaan Penanam Modal di Tahun 2023 menjadi 113 Perusahaan Penanam Modal di Tahun 2024. hal ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan PMDN terhadap Daerah semakin tinggi.

Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju akan berkontribusi positif pada pertumbuhan dunia usaha daerah melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik daerah dan lokasi daerah yang ditujukan untuk pembangunan industri dan perdagangan. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik dan lokasi ini adalah untuk menciptakan identitas daerah, meningkatkan basis pesona daerah (*amenity base*) dan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan daya tarik pusat kota (*civic center*). Kontrol untuk pembangunan dan perencanaan, Jika dilakukan dengan benar, ini akan meningkatkan iklim investasi di daerah dan meningkatkan citra pemerintah daerah. Selain itu, dibutuhkan pengaturan tata ruang yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Peruntukan lahan harus jelas dan tepat. Misalnya, harus ada kawasan pemukiman, industri, perdagangan, dan hijau, dan Pembangunan Infrastruktur seperti air bersih, listrik, taman, parkir, dan sebagainya sangat menarik bagi calon investor dan dunia usaha.

Sebagai kesimpulan bahwa Kabupaten Mamuju telah melakukan Strategi mengembangkan potensi dan investasi di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada prinsipnya adalah upaya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Mamuju itu sendiri, strategi pertumbuhan dan pembangunan daerah harus terus diterapkan secara berkelanjutan sehingga pemerintah daerah, pemerintah pusat serta masyarakat memiliki peranan yang sangat penting untuk mendorong atau bahkan meningkatkan kapasitas pembangunan ekonomi suatu daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif.

Tabel III.15
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
				Target	Realisasi	
1	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,57	5	7,15	69,93
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,99	2,27	2,77	81,95 %
Rata-rata capaian					75,94	

Pada Indikator Pertama Persentase Penduduk Miskin disebutkan bahwa berdasarkan Data Statistik Kabupaten Mamuju tahun 2024 Realisasi Penduduk Miskin sebesar 7,15 persen dari target Daerah Kabupaten Mamuju sebesar 5 persen atau Capaian Kinerja sebesar 69,93 persen. bila dibandingkan pada tahun sebelumnya atau lebih tepatnya pada tahun 2023 persentase Penduduk Miskin sebesar 7,57 persen. Dari jumlah angka persentase tersebut dapat kita lihat bahwa penduduk miskin di kabupaten Mamuju telah berhasil ditekan dari tahun sebelumnya dengan mengalami penurunan dengan realisasipada tahun 2024 sebesar 7,15 persen sehingga mengalami penurunan sekitar 0,42 persen.

Analisisnya disebutkan bahwa Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan hal ini disebabkan masih tingginya tingkat pengeluaran pada kebutuhan masyarakat.Pada tahun 2024, garis kemiskinan sebesar Rp.356.903 per kapita per bulan. dampaknya, jumlah penduduk miskin atau yang hidup dibawah garis kemiskinan mencapai 22,64 ribu orang atau 7,15 persen dari seluruh penduduk. maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan mamuju mengalami penurunan angka garis kemiskinan namun hal tersebut masih dianggap belum memuaskan dari target RPJMD sebesar 5 persen.

Sedangkan untuk Indikator kedua pada sasaran strategis 9 yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disebutkan ditahun 2024 Realisasi TPT sebesar 2,77 persen dari target

Daerah Kabupaten Mamuju sebesar 2,27 persen atau Capaian Kinerja sebesar 81,95 persen. terurai bahwa Jumlah pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin untuk Laki-laki sebanyak 1,640 Orang dan untuk perempuan sebanyak 2,812 Orang Penganguran Terbuka. Namun, dapat dilaporkan berdasarkan data diatas pemerintah kabupaten mamuju mampu menekan TPT dari tahun sebelumnya pada tahun 2023 yakni sebesar 2,99 persen walaupun belum mencapai target RPJMD 2,27 persen.

Gambaran kondisi tersebut bahwa setengah penganggur adalah penduduk bekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2024 adalah sebesar 8,00 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar 8 orang yang termasuk setengah penganggur. Dibandingkan Agustus 2023, tingkat setengah pengangguran mengalami kenaikan sebesar 1,32 persen poin. Sedangkan jika dibandingkan Agustus 2019 masih lebih tinggi sebesar 1,58 persen poin. Pada Agustus 2024, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 8,28 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 7,57 persen. Dibandingkan Agustus 2023, baik tingkat setengah pengangguran laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,34 persen poin dan 1,30 persen poin.

Untuk diketahui bahwa Pengangguran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

dapat disimpulkan bahwa menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan. Isu pengangguran sangat terkait dengan peluang kerja, kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Pengurangan pengangguran perlu menjadi prioritas pembangunan dengan mendorong investasi yang mampu menyerap tenaga kerja. Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat dan wilayah segitiga emas serta penopang ibukota Negara, Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu memanfaatkan potensi sumberdaya baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Dari identifikasi potensi dan kendala tersebut, Kabupaten Mamuju cukup mempunyai peluang dalam meningkatkan investasi dengan pertimbangan bahwa investasi mempunyai nilai strategis dalam mengungkit perekonomian daerah, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, Kabupaten Mamuju perlu distimulasi melalui penguatan bargaining position UMKM, sumberdaya wirausahawan dan pengembangan Bumdes sebagai pondasi perekonomian serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan yang memberi kontribusi terhadap kesenjangan pendapatan (gini ratio) antar wilayah satu dengan wilayah lainnya.

Tabel III.16
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kemandirian desa

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1 Indeks Desa Membangun	Skala	0,660 (Berkembang)	0,698 (Berkembang)	0,667 (Berkembang)	96
Rata-rata capaian					96

Disebutkan bahwa Capaian Kinerja pada sasaran Strategis 10 ini mendapatkan hasil sebesar 96 persen atau dengan kata lain berkembang dengan nilai skala 0,667 sedikit rendah dibawah dari yang ditargetkan dengan skala 0,698. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 0,660 dengan status skala 'desa berkembang' capaian tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,667 dengan status skala yang tetap yaitu dalam skala 'desa berkembang'.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2024, Kabupaten Mamuju memiliki nilai Indeks Desa Membangun sebesar 0,667 dengan jumlah desa sebanyak 88 desa. Dari keseluruhan jumlah desa tersebut, jumlah desa Berkembang sebanyak 42 desa (47,72 persen), jumlah desa maju sebanyak 25 desa (12,50 persen), dan jumlah desa tertinggal sebanyak 21 desa (23,86

persen). Sedangkan pada tahun 2023, nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Mamuju adalah 0,660 dengan jumlah desa yang sama sebanyak 88 desa.

Nilai Indeks Desa Membangun tersusun atas tiga yaitu Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Masing-masing nilai indeks memberikan kontribusi bobot yang sama dalam penentuan nilai IDM suatu desa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai IDM diperlukan langkah kebijakan yang tepat yang diwujudkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan capaian masing-masing indeks. Dibawah ini tersaji rata-rata nilai IDM untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Mamuju

Analisa dalam upaya pembangunan desa di wilayah Kabupaten Mamuju adalah nilai IKL yang mengalami penurunan. Seperti dijelaskan sebelumnya, faktor penentu IKL adalah kualitas lingkungan, tingkat kerawanan bencana dan respon/tanggap bencana. Kualitas lingkungan dilihat dari tingkat pencemaran air, udara, tanah, dan limbah. Tingkat kerawanan bencana dilihat dari frekuensi bencana banjir, longsor dan kebakaran (kekeringan) yang terjadi dalam 1 tahun, sedangkan respon/ tanggap bencana berkaitan dengan ada tidaknya peringatan dini, jalur evakuasi dan mitigasi bencana. Penurunan nilai IKL di Kabupaten Mamuju diakibatkan karena tingkat kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup atau pun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih rendah. Hal ini senada dengan ungkapan pendamping desa yang mengatakan bahwa “banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan lingkungan, seperti masih banyak yang buang sampah ke sungai sehingga terjadi pencemaran air dan tersumbatnya aliran sungai yang mengakibatkan banjir pada musim hujan. Hal lain yang harus mendapat perhatian adalah masalah pemberian ijin usaha oleh pemerintah kabupaten. Pemberian ijin usaha hendaknya mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan sehingga proses pembangunan bisa berkelanjutan. Nilai indeks ketahanan lingkungan juga ditentukan dari potensi kebencanaan yang mungkin terjadi di desa. Untuk itu diperlukan program kesiapsiagaan desa dalam menghadapi bencana. Pemerintah Kabupaten termasuk pemerintah desa perlu menyediakan anggaran agar program desa siaga dapat terimplementasi secara baik.

Desentralisasi dan otonomi desa pada hakikatnya adalah memandirikan masyarakat dan desa yang ditujukan dengan terbentuknya efektifitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan

sesuai dengan kondisi dan keperluan desa, membangkitkan kepercayaan dan tanggung jawab masyarakat dan desa untuk berprakarsa memanfaatkan potensi desa bagi pencapaian kesejahteraan. Efektifitas penggunaan dana desa yang diberikan pemerintah tentu harus bisa mengangkat derajat ketertinggalan desa di wilayah Kabupaten Mamuju yang dicirikan dengan meningkatnya nilai IDM di masing-masing desa. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis perkembangan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Mamuju .

Status ketertinggalan desa adalah permasalahan yang harus ditangani secara sinergis baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten termasuk desa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014. Pada pasal 112 dan 113 UU tersebut, peran pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan desa.

C. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Sedangkan Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju terealisasi sebesar Rp1.205.063.220.760,43 atau 98,46 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.223.867.879.901,00. Hal ini bisa dikatakan sebuah pencapaian yang cukup baik, walaupun hanya mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen, setidaknya tren realisasi pendapatan ini masih dapat dipertahankan yaitu sebesar 98,37 persen pada tahun 2023. Rincian target, realisasi dan capaian pendapatan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.17
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	97.503.880.661,00	91.256.590.772,43	93,59
2	Pendapatan Transfer	1.107.363.999.240,00	1.097.102.110.527,00	99,07
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.000.000.000,00	16.704.519.461,00	87,92
Jumlah		1.223.867.879.901,00	1.205.063.220.760,43	98,37

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 terdiri dari Pajak Daerah dengan sebesar Rp35.895.343.293,59 atau 100,81 persen, Retribusi Daerah sebesar Rp9.268.306.656,00 atau 63,28 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp4.270.328.840,00 atau 84,69 persen dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp41.822.611.982,84 atau 99,09 persen dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian PAD Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.18
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Daerah	35.607.705.306,00	35.895.343.293,59	100,81
2	Retribusi Daerah	14.645.744.856,00	9.268.306.656,00	63,28
3	Hasil Pengelolaan	5.042.087.993,00	4.270.328.840,00	84,69

	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.208.342.506,00	41.822.611.982,84	99,09
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		97.503.880.661,00	91.526.558.186,43	93,87

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian:

a. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp35.895.343.293,59 atau 100,81 persen. Pajak daerah pada tahun 2024 ini jika dilihat dari pencapaian menunjukkan adanya peningkatan persentase dan nominal. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan peningkatan tersebut, dengan hampir seluruh objek pajak menunjukkan peningkatan signifikan walaupun belum 100 persen optimal.

Selengkapnya mengenai rincian target, realisasi dan capaian Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.19
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Hotel	2.202.200.000,00	1.386.600.765,00	62,96
2	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	2.715.512.251,00	108,62
3	Pajak Hiburan	1.127.194.226,00	1.181.883.577,00	104,85
4	Pajak Reklame	814.550.000,00	979.870.000,00	120,30
5	Pajak Penerangan Jalan	16.364.539.784,00	16.669.177.491,00	101,86
6	Pajak Parkir	306.259.060,00	219.357.424,00	71,62

7	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	2.320.423,00	2,32
8	Pajak Sarang Burung Walet	976.240.447,00	2.880.000,00	0,30
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.305.798.785,00	4.354.758.442,00	188,86
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.339.431.404,00	2.698.785.817,84	80,82
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.571.491.600,00	5.684.197.102,75	102,02
Jumlah		35.607.705.306,00	35.895.343.293,59	100,81

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2024

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp9.268.306.656,00 atau 63,28 persen dari target Rp14.645.744.856,00 yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Peningktan realisasi retribusi ini disebabkan karena retribusi perlahan optimal pada setiap objeknya. Selain itu, dilakukan penyesuaian target yang dianggap dapat diterima secara realistik.

Rincian target, realisasi dan capaian retribusi daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.20
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju 2024

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Retribusi Jasa Umum				
	a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.600.000.000,00	6.724.226.100,00	120,08
	b.	Retribusi Pelayanan Persampahan	3.024.300.000,00	1.268.720.000,00	41,95

	c.	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan	1.494.250.000,00	182.500.000,00	12,21
	d.	Retribusi Pelayanan Pasar	650.000.000,00	435.481.000,00	67,00
2	Retribusi Jasa Usaha				
	a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	109.650.000,00	52.070.000,00	47,49
	b.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	200.000.000,00	0	0
	c.	Retribusi Rumah Potong Hewan	104.800.000,00	21.560.000,00	20,57
	d.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	110.100.000,00	0,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu				
	a.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.462.744.856,00	473.649.556,00	13,68
Jumlah Retribusi Daerah		14.645.744.856,00	9.268.306.656,00	63,28	

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp4.270.328.840,00 atau 84,69 persen. Pendapatan ini merupakan deviden atau bagian laba yang diterima dari penyertaan modal kepada Bank Sulselbar.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2024 sebesar Rp41.822.611.982,84 atau 99,09 persen dari target. Realisasi Lain-lain PAD ini harus

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tetapi jika dilihat dari persentase bisa dikatakan capaian yang baik. Penyebab penurunan realisasi ini selain disebabkan karena Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang selama ini menjadi target Lain-lain PAD, pada tahun 2024 menjadi target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah . Rincian Lain-lain PAD yang sah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.21
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.716.149.169,00	208.863.500,00	12,17
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	726.750.000,00	1.741.000.000,00	239,56
3	Jasa Giro	5.865.026.490,00	2.806.481.805,00	47,85
4	Pendapatan Bunga	0	23.560.577,00	-
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	132.857.966,00	-
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.416.847,00	751.315.080,24	150,14
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	400.000.000,00	0	0
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.700.300.098,60	127,84
9	Pendapatan BLUD	33.000.000.000,00	34.458.232.956,00	104,42
Jumlah		42.208.342.506,00	41.822.611.982,84	99,09

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2024

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar Rp1.097.102.110.527,00 atau 99,07 persen dari target yang telah ditetapkan. Rincian Pendapatan Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.22
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Dana Perimbangan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak				
	a.	Bagi Hasil Pajak			
		1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.652.809.000,00	2.058.781.000,00
		2	DBH PPh Pasal 21	5.915.414.000,00	7.256.952.000,00
		3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	87.926.000,00	90.138.000,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak			7.656.149.000,00	9.405.871.000,00	122,85
	b.	Bagi Hasil Bukan Pajak			
		1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	11.218.000,00	332.067.000,00
					2.960,13

		Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0	9.831.000,00	-
	3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	166.354.000,00	0,00	0,00
	4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.661.811.000,00	3.661.811.000,00	100,00
	5	DBH Sawit	4.563.360.000,00	4.563.360.000,00	100,00
Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak			8.402.743.000,00	8.567.069.000,00	101,96
2	Dana Alokasi Umum	647.270.520.000,00	657.413.682.000,00	101,57	
3	Dana Alokasi Khusus	302.651.939.000,00	279.544.758.680,00	92,37	
4	Dana Desa	86.323.445.000,00	86.323.445.000,00	100,00	
5	Insentif Fiskal	6.951.678.000,00	6.951.678.000,00	100,00	
6	Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	48.107.525.240,00	48.895.606.847,00	101,64	
Jumlah Pendapatan Transfer		1.107.363.999.240,00	1.097.102.110.527,00	99,07	

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2024 sebesar Rp16.704.519.461,00 atau 87,92 persen dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan ini berupa Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang seluruhnya diperuntukkan untuk belanja Operasional seluruh Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Mamuju. Sementara itu, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang merupakan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju yang selama ini menjadi target Pendapatan ini, pada tahun 2024 dipindahkan menjadi target Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sehingga terlihat adanya penurunan realisasi.

a. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Mamuju sebesar Rp1.251.196.419.550,00 atau tercapai 95,59 persen. Secara ringkas, Belanja dan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel III.23
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	507.217.608.348,00	499.773.175.745,00	98,53
2	Belanja Barang Jasa	352.458.254.362,00	334.968.712.389,00	95,04
3	Belanja Hibah	56.786.607.666,00	55.546.320.724,00	97,82
4	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	570.000.000,00	95,00
Jumlah Belanja Operasi		917.062.470.376,00	890.558.172.650,00	97,11
Belanja Modal				
1	Belanja Modal Tanah	386.405.000,00	22.065.760,00	5,71
2	Belanja Modal Peralatan Mesin	43.453.127.953,00	39.344.374.182,00	90,54
3	Belanja Modal Gedung Bangunan	112.104.938.683,00	88.727.406.636,00	79,15
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi Jaringan	76.745.799.180,00	74.435.307.687,00	96,99
5	Belanja Modal	1.429.375.000,00	1.429.190.000,00	99,99

	Aset Tetap Lainnya			
6	Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Jumlah Belanja Modal	234.129.645.816,00	203.968.344.265,00	87,12	
Belanja Tak Terduga				
1	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	175.006.800,00	35,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	175.006.800,00	35,00	
Transfer Bantuan Keuangan				
1	Bagi Hasil	5.015.345.017,00	4.294.845.635,00	85,63
2	Bantuan Keuangan	152.248.533.138,00	152.200.050.200,00	99,97
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	157.263.878.155,00	156.494.895.835,00	98,75	
Jumlah Belanja dan Transfer Daerah	1.308.955.994.347,00	1.251.196.419.550,00	95,59	

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Serapan realisasi belanja dan transfer tahun anggaran 2024 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 95,59 persen dari 93,37 persen. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja dan transfer yang memang meningkat dari tahun sebelumnya dan diikuti dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju yang mampu memaksimalkan belanja untuk kebutuhan operasional dan investasi daerah.

Jika memperhatikan setiap Jenis belanja, serapan realisasi bisa dikatakan cukup maksimal yang berada diatas angka 75 persen, kecuali beberapa jenis belanja tertentu yang masih rendah disebabkan karena berbagai kendala dalam proses pelaksanaannya.

Adapun jenis belanja yang dianggap rendah realisasinya yaitu:

- Belanja Modal Tanah hanya sebesar 5,71 persen yang sebagian besar untuk pensertifikatan tanah milik pemda belum bisa dilaksanakan karena berbagai kendala dalam proses penerbitan sertifikat atas tanah tersebut.
- Belanja Tak Terduga yang dianggarkan namun diharapkan untuk tidak digunakan hanya terealisasi sebesar 35,00 persen.

b. Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan netto tahun 2024 sebesar Rp85.088.114.446,04 bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa penggunaan Silpa tahun sebelumnya Rp85.088.114.446,04 sementara pada tahun 2024 tidak ada penganggaran untuk pengeluaran pembiayaan. Dan dari hasil tersebut, setelah memperhitungkan surplus dari pendapatan terhadap belanja, terdapat Sisa Lebih Penggunaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp38.954.915.656,47 yang akan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Pengelolaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.24
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penerimaan Pembiayaan				
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	85.088.114.446,00	85.088.114.446,04	100
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		85.088.114.446,00	85.088.114.446,04	100
2	Pengeluaran Pembiayaan				
	a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	100
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	100
	Jumlah Pembiayaan Daerah Neto		85.088.114.446,00	85.088.114.446,04	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkalaan (SILPA)		0,00	38.954.915.656,47	

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2024

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mamuju selama tahun 2024, media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan Keputusan pihak-pihakk terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat Langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gambaran kinerja daerah tahun 2023, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama tahun berjalan. Di samping dikemukakan Gambaran kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Mamuju telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 9 indikator sasaran atau 40,90 persen bermakna Baik Sekali, 9 indikator sasaran atau 40,90 persen bermakna Baik, 2 indikator sasaran atau 9,09 persen bermakna Cukup, 2 indikator sasaran atau 9,09 persen bermakna Kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 99,98 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata- rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 107,63 persen, dikategorikan Sangat Baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 bermakna Baik, menurun sebesar 7,65 persen capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Adapun rekomendasi Langkah-langkah perbaikan kinerja pemerintah kabupaten mamuju kedepan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan rencana aksi sakip pemkab Mamuju di seluruh unsur baik pada perencanaan kinerja - pengukuran kinerja - pelaporan kinerja - evaluasi akuntabilitas kinerja internal
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan rencana aksi yang dilaksanakan pemerintah daerah agar mendapatkan poin-poin perbaikan sesuai yang diharapkan
3. Mengembangkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) agar penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan kepada Masyarakat dapat terwujud di pemerintah kabupaten mamuju.

Demikian rekomendasi perbaikan kinerja kabupaten mamuju untuk peningkatan kinerja kedepannya.



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Ahmad Kirang No 39. Mamuju (Kode Pos) 91511 Sulawesi Barat
E-mail : inspektoratkabmamuju@gmail.com. Web : inspektoratkabmamuju.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas pada laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini walaupun masih diperlukan adanya perbaikan untuk meningkatkan keandalannya.

Mamuju, 26 Maret 2025
Inspektor Daerah,
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
INSPEKTORAT DAERAH
* MUHAMMAD YANI, S.H., M.Si., CGCAE, CGRE, QGIA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19710915 199903 1 007

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN MAMUJU

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	100
	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Peringkat / Nilai	Baik/A	Perlu Prbaikan/B	75
	Nilai LPPD	Skor	Sangat Tinggi	Sedang	50
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	90	76,74	85,26
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Per센	70	78	111,43
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Per센	70	82	117,14
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Per센	80	74,66	93,23
	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Sedang	Sedang	100
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Per센	68,70	71,86	104,59
	Indeks Pendidikan	Skala	0,42	0,64	152,38
	Indeks Kesehatan	Skala	0,578	0,802	138,75
	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	32.500	10.440	32,12
	Indeks Pemberdayaan Gender	Per센	59,87	60,96	101,82
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Per센	65	77	122
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks ketentraman dan ketertiban	Per센	100	99,65	99,65
	Indeks Kriminilitas	Per센	100	99,65	99,65
Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	Indeks Gini	Per센	0,25	0,425	58,82
	Pertumbuhan ekonomi	Per센	5.6-5.7%	6,47	113,50
Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi	Per센	15	45,04	300,26
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penduduk Miskin	Per센	5	7,15	69,93
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Per센	2,27	2,77	81,95
Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Skala	0,698 (Berkembang)	0,667 (Berkembang)	96

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. SITI SUTINAH SUHARDI

Jabatan : BUPATI MAMUJU

Berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mamuju, Maret 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN MAMUJU

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Peringkat	Baik
	Nilai LPPD	Skor	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	90
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	70
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	70
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	80
	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Sedang
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	68,70
	Indeks Pendidikan	Skala	0,42
	Indeks Kesehatan	Skala	0,578
	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	32.500
	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	59,87
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	65
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	100
	Indeks Kriminilitas	Persen	100
Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	Indeks Gini	Persen	0,25
	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5.6 - 5.7%
Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi	Persen	15
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,27
Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Skala	0,698 (Berkembang)





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN TA 2024	REALISASI TA 2024	(%)	REALISASI TA 2023
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	35,607,705,306.00	35,895,343,293.59	100.81	30,365,234,539.14
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	14,645,744,856.00	9,538,274,070.00	65.13	8,824,184,725.05
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	5,042,087,993.00	4,270,328,840.00	84.69	4,233,776,476.00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.a.4)	42,208,342,506.00	41,822,611,982.84	99.09	58,183,570,853.71
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (3 s/d 6)		97,503,880,661.00	91,526,558,186.43	93.87	101,606,766,593.90
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.b.1)				
10	Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1)a)	7,656,149,000.00	9,405,871,000.00	122.85	10,318,140,430.00
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1)b)	8,402,743,000.00	8,567,069,000.00	101.96	9,737,619,475.00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.b.1)c)	647,270,520,000.00	657,413,682,000.00	101.57	621,340,591,953.00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.b.1)d)	302,651,939,000.00	279,544,758,680.00	92.37	256,545,824,857.00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s/d 13)		965,981,351,000.00	954,931,380,680.00	98.86	897,942,176,715.00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.b.2)				
16	Dana Insentif Daerah (DID)				#DIV/0!	10,176,284,000.00
17	Dana Desa				100.00	85,572,902,000.00
18	Insentif Fiskal				100.00	-
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 17)		93,275,123,000.00	93,275,123,000.00	100.00	95,749,186,000.00
20	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.b.3)				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.3)a)	48,107,525,240.00	48,895,606,847.00	101.64	46,628,150,786.00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (20)		48,107,525,240.00	48,895,606,847.00	101.64	46,628,150,786.00
23	Bantuan Keuangan	5.1.1.b.4)				
24	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.1.1.b.4)a)			#DIV/0!	6,420,000,000.00
25	Jumlah Bantuan Keuangan (23)				#DIV/0!	6,420,000,000.00
26	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14 + 18 +21 + 24)		1,107,363,999,240.00	1,097,102,110,527.00	99.07	1,046,739,513,501.00
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.c				
28	Pendapatan Hibah	5.1.1.c.1)				
29	Pendapatan Lainnya	5.1.1.c.2)				
30	Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (27 s/d 28)		19,000,000,000.00	16,704,519,461.00	87.92	48,642,558,839.00
31	TOTAL PENDAPATAN (7 + 25 +29)		1,223,867,879,901.00	1,205,333,188,174.43	98.49	1,196,988,838,933.90
32	BELANJA	5.1.2				
33	BELANJA OPERASI	5.1.2.a				
34	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	507,217,608,348.00	499,773,175,745.00	98.53	424,150,602,261.00
35	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2)	352,458,254,362.00	334,963,712,389.00	95.04	321,947,512,168.00
36	Belanja Hibah	5.1.2.a.3)	56,786,607,666.00	55,545,798,724.00	97.81	22,090,349,472.00
37	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.4)	600,000,000.00	570,000,000.00	95.00	-
38	JUMLAH BELANJA OPERASI (33 s/d 36)		917,062,470,376.00	890,852,686,858.00	97.14	768,188,463,901.00
39	BELANJA MODAL	5.1.2.b				
40	Belanja Modal Tanah	5.1.2.b.1)	386,405,000.00	22,065,760.00	5.71	108,925,000.00
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.2)	43,453,127,953.00	39,344,374,182.00	90.54	60,370,283,235.00
42	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3)	112,104,938,683.00	88,727,406,636.00	79.15	111,326,417,318.00
43	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b.4)	76,745,799,180.00	74,435,307,687.00	96.99	66,168,909,423.00
44	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5)	1,429,375,000.00	1,429,190,000.00	99.99	5,569,398,050.00
45	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.b.6)	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	147,180,908.00
46	JUMLAH BELANJA MODAL (38 s/d 43)		234,129,645,816.00	203,968,344,265.00	87.12	243,691,113,934.00
47	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.c				
48	Belanja Tak Terduga		500,000,000.00	175,006,800.00	35.00	41,258,973.00
49	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (46)		500,000,000.00	175,006,800.00	35.00	41,258,973.00
50	TOTAL BELANJA (36 + 44 +47)		1,151,692,116,192.00	1,094,996,037,923.00	95.08	1,011,920,836,808.00
51	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.d				
52	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.d.1)	5,015,345,017.00	4,294,845,635.00	85.63	3,959,920,458.00
53	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.d.2)	152,248,533,138.00	152,200,050,200.00	99.97	148,685,153,601.00
54	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (50 s/d 51)		157,263,878,155.00	156,494,895,835.00	99.51	152,645,074,059.00
55	TOTAL TRANSFER (52)		157,263,878,155.00	156,494,895,835.00	99.51	152,645,074,059.00
56	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (48 + 53)		1,308,955,994,347.00	1,251,490,933,758.00	95.61	1,164,565,910,867.00
57	SURPLUS / (DEFISIT) (30-54)	5.1.3	- 85,088,114,446.00	- 46,157,745,583.57	54.25	32,422,928,066.90
58	PEMBIAYAAN					
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4				
60	Penggunaan SiLPA	5.1.4.a	85,088,114,446.00	85,088,114,446.04	100.00	56,665,186,379.14
61	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (58)		85,088,114,446.00	85,088,114,446.04	100.00	56,665,186,379.14
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5				
64	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (61)				0.00	4,000,000,000.00
65	PEMBIAYAAN NETTO (59 - 61)	5.1.6	85,088,114,446.00	85,088,114,446.04	100.00	52,665,186,379.14
66	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) (55 + 62)	5.1.7		- 38,930,368,862.47		85,088,114,446.04

Mamuju, 2025

Bupati Mamuju,


Hj. SITI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si

" Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini "

Penjabaran Program Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik																	
Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	CC	210.093.5 24.365	B	215.347.0 03.322	B	220.712.5 06.253	BB	226.207.9 92.375	A	234.126.5 03.778	A	1.106.487. 530.093		
Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Predikat	Baik	Baik	161.213.7 30.314	Baik	165.244.0 73.574	Baik	169.375.1 75.410	Baik	173.609.5 54.795	Baik	177.949.7 93.669	Baik	847.392.3 27.762		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Percentase Penyampaian Raperda APBD/P sesuai dengan Ketentuan	Per센	100	100	31.761.44 0.701	100	32.555.47 6.719	100	33.369.36 3.636	100	34.203.59 7.727	100	35.058.68 7.671	100	166.948.5 66.454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Percentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Per센	100	100	31.761.44 0.701	100	32.555.47 6.719	100	33.369.36 3.636	100	34.203.59 7.727	100	35.058.68 7.671	100	166.948.5 66.454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Percentase SP2D yang Terbit sesuai Ketentuan	Per센	100	100	31.761.44 0.701	100	32.555.47 6.719	100	33.369.36 3.636	100	34.203.59 7.727	100	35.058.68 7.671	100	166.948.5 66.454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Percentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban sesuai ketentuan	Per센	100	100	31.761.44 0.701	100	32.555.47 6.719	100	33.369.36 3.636	100	34.203.59 7.727	100	35.058.68 7.671	100	166.948.5 66.454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Percentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan	Per센	100	100	31.761.44 0.701	100	32.555.47 6.719	100	33.369.36 3.636	100	34.203.59 7.727	100	35.058.68 7.671	100	166.948.5 66.454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					

	Outcome)		RPJMD	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Percentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persen	85	85	1.189.496.389	85	1.219.233.799	85	1.249.714.644	85	1.280.957.510	85	1.312.981.448	85	6.252.383.790	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Percentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	7.04	7.04	608.515.210	7.04	623.728.090	7.04	639.321.293	7.04	655.304.325	7.04	671.686.933	7.04	3.198.555.851	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran Pad Dalam Apbd	Persen	(0.87)	(0.87)	608.515.210	(0.87)	623.728.090	(0.87)	639.321.293	(0.87)	655.304.325	(0.87)	671.686.933	(0.87)	3.198.555.851	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	Nilai LPPD	Skor	Tinggi	Sangat Tinggi	34.666.090.159	Sangat Tinggi	35.533.883.257	Sangat Tinggi	36.403.380.067	Sangat Tinggi	37.291.833.112	Sangat Tinggi	38.275.794.622	Sangat Tinggi	182.170.981.217		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase Keselarasaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100	100	633.162.495	100	661.353.263	100	670.367.647	100	676.937.250	100	757.080.363	100	3.398.901.018	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	Persen	100	100	259.777.250	100	262.323.067	100	264.893.833	100	267.489.793	100	270.111.193	100	1.324.595.136	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	Persen	100	100	233.364.200	100	235.651.169	100	237.960.551	100	240.292.564	100	242.647.431	100	1.189.915.915	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya yang tercapai	Persen	100	100	245.073.104	100	247.474.820	100	249.900.074	100	252.349.094	100	254.822.115	100	1.249.619.207	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Rasio	8.15	9	32.000.000	9.95	32.800.000	10	33.620.000	10	34.460.500	10	35.322.013	10	168.202.513	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk kepentingan Negara	Rasio	N/A	50	50.000.000	70	51.250.000	80	52.531.250	90	53.844.531	100	55.190.645	100	262.816.426	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Tingkat kesesuaian perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Persen	70	70	37.327.000	80	38.260.175	90	39.216.679	90	40.197.096	100	41.202.024	100	196.202.974	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Predikat	Memuaskan	Memuaskan	27.472.886.110	Memuaskan	28.159.708.263	Memuaskan	28.863.700.969	Memuaskan	29.585.293.494	Memuaskan	30.324.925.831	Memuaskan	144.406.514.667	SEKRETARIAT DPRD	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	80	83	402.500.000	85	412.562.500	90	422.876.563	95	433.448.477	100	444.284.688	100	2.115.672.228	INSPEKTORAT DAERAH	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Audit dengan Tujuan tertentu	Persen	100	100	402.500.000	100	412.562.500	100	422.876.563	100	433.448.477	100	444.284.688	100	2.115.672.228	INSPEKTORAT DAERAH	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Obyek Pengawasan yang diawasi	Persen	100	100	345.000.000	100	353.625.000	100	362.465.625	100	371.527.266	100	380.815.447	100	1.813.433.338	INSPEKTORAT DAERAH	

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Zona Integritas, Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, Presentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN	Persen	100	100	400.000.000	100	410.000.000	100	420.250.000	100	430.756.250	100	441.525.156	100	2.102.531.406	INSPEKTORAT DAERAH	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase (%) Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	35.6	2.0	1.622.500.000	2.1	1.663.062.500	1.9	1.704.639.063	2.3	1.747.255.039	2.0	1.790.936.415	2.0	8.528.393.017	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase (%) ASN Yang Meningkat Kompetensinya	Persen	6.2	11.0	2.530.000.000	11.0	2.593.250.000	11.0	2.658.081.250	11.0	2.724.533.281	11.0	2.792.646.613	11.0	13.298.511.144	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	80	90	14.213.703.892	90	14.569.046.491	90	14.933.950.776	90	15.306.604.468	90	17.900.915.487	90	76.924.221.114		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi	Persen	100	100	150.000.000	100	153.750.000	100	157.593.750	100	161.533.594	100	200.000.000	100	822.877.344	SEKRETARIAT DAERAH	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	Persen	100	100	5.025.113.000	100	5.150.740.825	100	5.279.509.346	100	5.411.497.079	100	7.357.267.943	100	28.224.128.193	SEKRETARIAT DAERAH	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	Persen	100	100	522.894.882	100	535.967.254	100	549.366.435	100	563.100.596	100	765.570.397	100	2.936.899.564	SEKRETARIAT DAERAH	

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang kerjasama daerah yang terlaksana	Persen	100	100	495.000.00	100	507.375.00	100	520.059.375	100	533.060.859	100	724.729.500	100	2.780.224.734	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	Persen	100	100	314.543.998	100	322.407.598	100	330.467.788	100	338.729.483	100	347.197.720	100	1.653.346.587	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian yang terlaksana	Persen	100	100	158.272.950	100	162.229.774	100	166.285.518	100	170.442.656	100	174.703.722	100	831.934.620	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Persen	100	100	814.225.998	100	834.581.648	100	855.446.189	100	876.832.344	100	898.753.152	100	4.279.839.331	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang SDA (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air yang terlaksana	Persen	100	100	193.686.900	100	198.529.073	100	203.492.299	100	208.579.607	100	213.794.097	100	1.018.081.976	SEKRETARIAT DAERAH
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas	Persen	91	100	683.038.500	100	700.114.463	100	717.617.324	100	735.557.757	100	753.946.701	100	3.590.274.745	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi	Persen	100	100	683.038.500	100	700.114.463	100	717.617.324	100	735.557.757	100	753.946.701	100	3.590.274.745	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE	Persen	31	67	2.983.797.600	78	3.058.392.540	89	3.134.852.354	100	3.213.223.662	100	3.293.554.254	100	15.683.820.410	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	N/A	50	500.000.000	75	512.500.000	100	525.312.500	100	538.445.313	100	551.906.445	100	2.628.164.258	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	Persen	N/A	31	184.501.115	44	189.113.643	56	193.841.484	67	198.687.521	89	203.654.709	89	969.798.472	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	100	100	715.000.000	100	732.875.000	100	751.875.000	100	769.976.797	100	789.226.217	100	3.758.953.014	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Persen	100	100	443.000.000	100	454.075.000	100	465.426.875	100	477.062.547	100	488.989.111	100	2.328.553.533	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	313.056.522	100	320.882.935	100	328.905.008	100	337.127.634	100	345.555.824	100	1.645.527.923	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	34.533.927	100	35.397.275	100	36.282.207	100	37.189.262	100	38.118.994	100	181.521.665	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan																
Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	N/A	50	167.359.411.907	60	171.573.397.206	70	176.237.732.134	80	180.643.675.442	90	185.159.767.328	90	880.973.984.017	
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	N/A	50	149.552.017.546	60	153.320.817.986	70	157.528.838.434	80	161.467.059.397	90	165.503.735.883	90	787.372.469.246	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	persen	N/A	60	5.014.906.655	63	5.140.279.321	66	5.268.786.304	69	5.400.505.962	73	5.535.518.611	73	26.359.996.853	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	N/A	60	5.014.906.655	63	5.140.279.321	66	5.268.786.304	69	5.400.505.962	73	5.535.518.611	73	26.359.996.853	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	persen	73.1	82.1	7.786.707.311	86.6	7.981.374.994	91.1	8.180.909.369	95.6	8.385.432.103	100	8.595.067.906	100	40.929.491.683	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	persen	N/A	N/A	0	30	1.000.000.000	35	1.090.000.000	40	1.180.000.000	45	1.280.000.000	45	4.550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	60	70	2.629.974.900	75	2.695.724.273	80	2.763.117.379	85	2.832.195.314	90	2.903.000.197	90	13.824.012.063	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	21.49	27.49	1.328.925.100	30.49	1.362.148.228	33.49	1.396.201.933	36.49	1.431.106.982	39.49	1.466.884.656	39.49	6.985.266.899	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur jalan permukiman kondisi baik	persen	30	44	6.643.155.225	50	6.809.234.106	56	6.979.464.958	62	7.153.951.582	68	7.332.800.372	68	34.918.606.243	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	24.30	26.10	18.789.537.550	27.10	19.259.275.989	28.10	19.740.757.889	19.10	20.234.276.836	30.10	20.740.133.757	30.10	98.763.982.021	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan lingkungan	persen	10.30	39.90	240.300.000	53.90	246.307.500	68.80	252.465.188	83.70	258.776.817	98.60	265.246.238	98.60	1.263.095.743	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	48.72	54.72	80.000.000.000	57.72	81.000.000.000	60.72	82.960.000.000	63.72	84.971.250.000	66.72	87.025.031.250	66.72	415.956.281.250	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	10	20	191.604.150	25	196.394.254	30	201.304.110	35	206.336.713	40	211.495.131	40	1.007.134.358	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																									
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2022										Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tata ruang	persen	9	9	900.000.000	18	922.500.000	27	1.320.562.500	36	1.353.576.563	45	1.387.415.977	45	5.884.055.040	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	100	100	11.400.000.000	100	11.685.000.000	100	11.977.125.000	100	12.276.553.125	100	12.583.466.953	100	59.922.145.078	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN									
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	49.84	49.64	930.000.000	49.49	953.250.000	49.35	977.081.250	49.22	1.001.508.281	49.10	1.026.545.988	246.8	4.888.385.519	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN									

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas Permukiman yang tertata	persen	10.13	14.89	1.550.000.000	14.85	1.588.750.000	15.79	1.628.468.750	16.24	1.669.180.469	16.69	1.710.909.980	78.46	8.147.309.199	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU	persen	78	80	3.500.000.000	80	3.587.500.000	80	3.677.187.500	80	3.769.117.188	80	3.863.345.117	80	18.397.149.805	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan kemampuan kecil yg bersertifikasi	persen	N/A	30	10.000.000	40	10.250.000	45	10.506.250	50	10.768.906	55	11.038.129	55	52.563.285	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	hektar	N/A	45	22.000.000	50	22.550.000	55	23.113.750	60	23.691.594	65	24.283.884	65	115.639.228	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	persen	N/A	100	25.000.000	100	25.625.000	100	26.265.625	100	26.922.266	100	27.595.322	100	131.408.213	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	hektar	85	86	3.250.000.000	87	3.331.250.000	88	3.414.531.250	89	3.499.894.531	90	3.587.391.895	90	17.083.067.676	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap dire distribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	N/A	87	75.000.000	88	76.875.000	89	78.796.875	90	80.766.797	91	82.785.967	91	394.224.639	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tersedianya tanah untuk masyarakat	persen	N/A	N/A	0	100	30.000.000	100	30.750.000	100	31.518.750	100	32.306.719	100	124.575.469	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	250.000.000	100	256.250.000	100	262.656.250	100	269.222.656	100	275.953.223	100	1.314.082.129	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	N/A	80	13.897.394.361	80	14.244.829.220	80	14.600.949.950	80,5	14.965.973.701	80,6	15.340.123.043	80,6	73.049.270.275	
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
Tahun 2022																
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target	Rp.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	100	100	257.567.000	100	264.006.175	100	270.606.329	100	277.371.488	100	284.305.775	100	1.353.856.767	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang	persen	N/A	50	205.000.000	55	210.125.000	60	215.378.125	65	220.762.578	70	226.281.643	70	1.077.547.346	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai	persen	0.01	0.01	4.860.000.000	0.01	4.981.500.000	0.01	5.106.037.500	0.01	5.233.688.438	0.01	5.364.530.648	0.01	25.545.756.586	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	persen	N/A	100	125.000.000	100	128.125.000	100	131.328.125	100	134.611.328	100	137.976.611	100	657.041.064	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Percentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	persen	N/A	82	150.000.00	84	153.750.00	86	157.593.750	88	161.533.594	90	165.571.934	90	788.449.278	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	persen	N/A	100	30.000.000	100	30.750.000	100	31.518.750	100	32.306.719	100	33.114.387	100	157.689.856	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	persen	N/A	100	50.000.000	100	51.250.000	100	52.531.250	100	53.844.531	100	55.190.645	100	262.816.426	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup	persen	N/A	100	30.000.000	100	30.750.000	100	31.518.750	100	32.306.719	100	33.114.387	100	157.689.856	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	persen	N/A	100	20.000.000	100	20.500.000	100	21.012.500	100	21.537.813	100	22.076.258	100	105.126.571	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Percentase jumlah sampah yang tertangani	persen	74	73	8.169.827.361	72	8.374.073.045	71	8.583.424.871	70	8.798.010.493	72	9.017.960.755	72	42.943.296.525	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Tinggi	Tinggi	3.910.000.000	Tinggi	4.007.750.000	Sedang	4.107.943.750	Sedang	4.210.642.344	Sedang	4.315.908.402	Sedang	20.552.244.496		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persen	50	55	3.910.000.000	60	4.007.750.000	65	4.107.943.750	70	4.210.642.344	80	4.315.908.402	80	20.552.244.496	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.																	
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	68,15	68,35	320.217,652.766	68,5	328.299,499.083	68,7	336.380,891.557	68,85	344.766,812.850	69,05	353.362,394.324	69,05	1.683.027.250.580		
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					

	Outcome)		RPJMD	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan	Skala	0,26	0,3	129.081.4 60.311	0,36	132.384.9 01.817	0,42	135.568.4 29.361	0,5	138.934.0 45.099	0,55	142.383.8 01.223	0,55	678.352.6 37.811	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Percentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	Persen	48.30	50.72	105.038.4 35.535	53.25	107.664.3 96.423	55.91	110.356.0 06.334	58.71	113.114.9 06.492	61.64	115.942.7 79.155	61.64	552.116.5 23.939	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar	Paket	2500 Paket	3000 Paket	82.500.00 0	3500 Paket	84.562.50 0	4000 Paket	86.676.56 3	4500 Paket	88.843.47 7	5000 Paket	91.064.56 3	20.000 Paket	433.647.1 03	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Murid	Rasio	1:20 Rasio	1:20 Rasio	16.819.26 4.088	1:20 Rasio	17.339.74 5.690	1:20 Rasio	17.670.73 9.332	1:20 Rasio	18.112.50 7.816	1:20 Rasio	18.565.32 0.511	1:20 Rasio	88.507.57 7.437	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Percentase Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terkreditasi Minimal B	Persen	63.39	63.89	150.000.0 00	64.39	153.750.0 00	64.89	157.593.7 50	65.39	161.533.5 94	65.89	165.571.9 34	65.89	788.449.2 78	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Percentase Pemuda yang berpartisipasi dalam ekonomi mandiri	Persen	12.32	12.82 Persen	857.999.9 98	13.32 Persen	879.449.9 98	13.82 Persen	901.436.2 48	14.32 Persen	923.972.1 54	14.82 Persen	947.071.4 58	14.82 Persen	4.509.929. 856	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	4 Prestasi	5 Prestasi	447.700.0 00	6 Prestasi	458.892.5 00	7 Prestasi	470.364.8 12	8 Prestasi	482.123.9 33	8 Prestasi	494.177.0 31	34 Prestasi	2.353.258. 276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	Orang	6 Orang	7 Orang	447.700.00	8 Orang	458.892.500	9 Orang	470.364.812	10 Orang	482.123.933	10 Orang	494.177.031	44 Orang	2.353.258.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	50.75	51.25 Persen	447.700.00	51.75 Persen	458.892.500	52.25 Persen	470.364.812	52.75 Persen	482.123.933	53.25 Persen	494.177.031	53.25 Persen	2.353.258.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pelatih yang bersertifikat	Persen	38.87	39.37 Persen	447.700.00	39.87 Persen	458.892.500	40.37 Persen	470.364.812	40.87 Persen	482.123.933	41.37 Persen	494.177.031	41.37 Persen	2.353.258.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarpras olahraga yang layak	Persen	0.05	0.06 Persen	447.700.00	0.07 Persen	458.892.500	0.07 Persen	470.364.812	0.08 Persen	482.123.933	0.08 Persen	494.177.031	0.08 Persen	2.353.258.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi keperamukaan	Orang	0 Orang	100 Orang	943.799.998	100 Orang	4.718.999.990	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA								
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk	persen	1:18 Rasio	1:18 Rasio	712.740.173	1:17 Rasio	730.558.677	1:16 Rasio	748.822.644	1:15 Rasio	767.543.210	1:14 Rasio	786.731.790	1:14 Rasio	3.746.396.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Dengan Penduduk	persen	1:20.00 Rasio	1:20.00 Rasio	712.740.173	1:19.00 Rasio	730.558.677	1:18.00 Rasio	748.822.644	1:17.00 Rasio	767.543.210	1:16.00 Rasio	786.731.790	1:16.00 Rasio	3.746.396.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	orang	0.21	0.21	712.740.173	0.21	730.558.677	0.21	748.822.644	0.21	767.543.210	0.21	786.731.790	0.21	3.746.396.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	prestasi	10	10	712.740.173	11	730.558.677	12	748.822.644	13	767.543.210	14	786.731.790	14	3.746.396.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Regulasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno yang ditetapkan	orang	100	100	100.000.000	100	102.500.000	100	105.062.500	100	107.689.063	100	110.381.289	100 Perse n	525.632.852	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	Indeks Kesehatan	Skala	0,508	0,522	181.292.086.187	0,556	185.824.388.341	0,578	190.469.998.049	0,612	195.231.747.998	0,632	200.112.541.702	0,632	952.930.762.277			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persen	8.3	100	133.618.065.166	100	136.958.641.796	100	140.382.732.840	100	143.892.426.161	100	147.489.861.815	100	702.341.727.778	DINAS KESEHATAN		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	Persen	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	25.000.000	DINAS KESEHATAN		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Persen	100	100	36.932.424.796	100	37.855.735.416	100	38.802.128.801	100	39.772.182.021	100	40.766.486.572	100	194.128.957.606	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	Jumlah	25	30	1.942.974.000	40	1.991.548.350	60	2.041.337.059	80	2.092.370.485	100	2.144.679.747	100	10.212.909.641	DINAS KESEHATAN		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS	Persen	80	85	230.565.500	100	236.329.638	100	242.237.878	100	248.293.825	100	254.501.171	100	1.211.928.012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	persen	70	75	1.024.930.210	80	1.050.553.465	85	1.076.817.302	90	1.103.737.734	95	1.131.331.178	95	5.387.369.889	DINAS KESEHATAN		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	Persen	41.27	50	599.126.514	55	614.104.677	60	629.457.293	65	645.193.726	70	661.323.569	70	3.149.205.779	DINAS KESEHATAN		

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Berwawasan Kependudukan	Persen	n/a	53.00	245.000.000	55.00	251.125.000	57.00	257.403.125	59.00	263.838.203	61.00	270.434.158	61.00	1.287.800.486	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmeet need KB	Persen	9.16	8.25	2.039.666.667	8.00	2.090.658.333	7.70	2.142.924.792	7.40	2.196.497.911	7.00	2.251.410.359	7.00	10.721.158.062	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	63.39	65.00	2.039.666.667	67.00	2.090.658.333	68.00	2.142.924.792	69.00	2.196.497.911	70.00	2.251.410.359	70.00	10.721.158.062	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio akseptor KB	Persen	73.70	74.00	2.039.666.667	74.30	2.090.658.333	74.50	2.142.924.792	74.80	2.196.497.911	75.00	2.251.410.359	75.00	10.721.158.062	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang ber-KB mandiri	Persen	82.74	82.90	115.000.000	83.00	117.875.000	83.10	120.821.875	83.20	123.842.422	83.30	126.938.483	83.30	604.477.780	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

			Kondisi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada	Perangkat
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-----------

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	80.92	81.30	115.000.000	81.50	117.875.000	81.60	120.821.875	81.80	123.842.422	82.00	126.938.483	82.00	604.477.780	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	71.94	72.30	115.000.000	72.50	117.875.000	72.60	120.821.875	72.80	123.842.422	73.00	126.938.483	73.00	604.477.780	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	77.23	78.00	115.000.000	78.30	117.875.000	78.50	120.821.875	78.80	123.842.422	79.00	126.938.483	79.00	604.477.780	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	Persen	90.0	90.9	115.000.000	90.9	117.875.000	90.9	120.821.875	90.9	123.842.422	100	126.938.483	100	604.477.780	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Rii Yang Disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	9.500	12.000	6.746.152.726	24.000	6.914.806.544	32.500	7.087.676.707	44.000	7.264.868.625	52.000	7.446.490.344	52.000	35.459.994.946	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP	persen	14.37	15.19	45.000.000	15.55	46.125.000	15.90	47.278.125	16.25	48.460.078	16.61	49.671.580	16.61	236.534.783	DINAS PERDAGANGAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Toko (IKK Outcome)																
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Percentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	71.43	73.32	6.000.000.000	75.09	6.150.000.000	76.68	6.303.750.000	78.63	6.461.343.750	80.41	6.622.877.344	80.41	31.537.971.094	DINAS PERDAGANGAN	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Percentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	2	3	50.000.000	5	51.250.000	6	52.531.250	7	53.844.531	8	55.190.645	8	262.816.426	DINAS PERDAGANGAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Percentase Peningkatan Volume Eksport	Persen	2	3	75.000.000	5	76.875.000	7	78.796.875	8	80.766.797	9	82.785.967	9	394.224.639	DINAS PERDAGANGAN	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Percentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	Persen	76.78	79.08	59.976.000	83.69	61.475.400	85.99	63.012.285	88.29	64.587.592	88.29	66.202.282	88.29	315.253.559	DINAS PERDAGANGAN	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Percentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	persen	N/A	1.50	150.000.000	2	153.750.000	2.5	157.593.750	3.00	161.533.594	3.50	165.571.934	3.50	788.449.278	DINAS PERDAGANGAN	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Percentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	persen	135	100	75.180.842	100	77.060.363	100	78.986.872	100	80.961.544	100	82.985.583	100	395.175.204	DINAS KETAHANAN PANGAN	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	persen	3.4	3.6	75.180.842	3.8	77.060.363	4	78.986.872	4.2	80.961.544	4.4	82.985.583	4.4	395.175.204	DINAS KETAHANAN PANGAN		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional	persen	100	100	75.180.842	100	77.060.363	100	78.986.872	100	80.961.544	100	82.985.583	100	395.175.204	DINAS KETAHANAN PANGAN		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	persen	100	100	90.000.000	100	92.250.000	100	94.556.250	100	96.920.156	100	99.343.160	100	473.069.566	DINAS KETAHANAN PANGAN		
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	persen	85	85	50.634.200	85	51.900.055	85	53.197.556	85	54.527.495	85	55.890.683	85	266.149.989	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	58,96	59,12	1.715.000.000	59,58	1.757.875.000	59,87	1.801.821.875	60,12	1.846.861.423	60,55	1.893.039.108	60,55	9.014.597.406			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	20	23	280.000.000	25	287.000.000	27	294.175.000	30	301.523.375	35	309.067.609	35	1.471.765.984	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	Persen	100	100	275.000.000	100	281.875.000	100	288.921.875	100	296.144.922	100	303.548.545	100	1.445.490.342	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB	Persen	n/a	29.03	250.000.000	35.16	256.250.000	41.29	262.656.250	50.65	269.222.656	60.00	275.953.223	60.00	1.314.082.129	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak	Persen	n/a	100	150.000.000	100	153.750.000	100	157.593.750	100	161.533.594	100	165.571.934	100	788.449.278	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan,Kecamatan layak anak)	Persen	22.22	29.63	500.000.000	33.33	512.500.000	40.74	525.312.500	48.15	538.445.313	55.56	551.906.445	55.56	2.628.164.258	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100	100	260.000.000	100	266.500.000	100	273.162.500	100	279.991.563	100	286.991.352	100	1.366.645.415	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	50	55	1.382.953.542	60	1.417.527.381	65	1.452.965.565	70	1.489.289.705	75	1.526.521.947	75	7.269.258.140			
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	Persen	50	50	529.394.800	58	542.629.670	67	556.195.411	75	570.100.297	75	584.352.804	75	2.782.672.982	DINAS SOSIAL		
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	100	100	12.425.160	100	12.735.789	100	13.054.184	100	13.380.538	100	13.715.052	100	65.310.723	DINAS SOSIAL		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	Persen	100	100	300.000.000	100	307.500.000	100	315.187.500	100	323.067.188	100	331.143.867	100	1.576.898.555	DINAS SOSIAL		

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Percentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	Persen	62,67	58,46	400.268.902	56,69	410.275.625	55,12	420.532.515	53,73	431.045.828	52,49	441.821.974	52,49	2.103.944.844	DINAS SOSIAL
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Percentase Korban Bencana Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPM)	Persen	N/A	100	132.946.880	100	136.270.552	100	139.677.316	100	143.169.249	100	146.748.480	100	698.812.477	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Percentase Peningkatan Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persen	100	100	7.917.800	100	8.115.745	100	8.318.639	100	8.526.605	100	8.739.770	100	41.618.559	DINAS SOSIAL
Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya dan kearifan lokal																
Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	N/A	100	7.144.258.876	100	7.322.865.349	100	7.505.936.982	100	7.693.585.406	100	7.885.925.041	100	37.552.571.654	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks kriminilitas	Persen	N/A	100	7.144.258.876	100	7.322.865.349	100	7.505.936.982	100	7.693.585.406	100	7.885.925.041	100	37.552.571.654	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Percentase Potensi Konflik SARA yang tertangani	Persen	N/A	100	29.967.300	100	30.716.483	100	31.484.395	100	32.271.504	100	33.078.292	100	157.517.974	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Percentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	Persen	100	100	720.545.921	100	738.559.569	100	757.023.558	100	775.949.147	100	795.347.876	100	3.787.426.071	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terbina	Persen	100	100	431.090.00	100	441.867.250	100	452.913.931	100	464.236.780	100	475.842.699	100	2.265.950.660	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	Persen	100	100	29.487.700	100	30.224.893	100	30.980.515	100	31.755.028	100	32.548.903	100	154.997.039	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang tertangani	Persen	100	100	55.000.000	100	56.375.000	100	57.784.375	100	59.228.984	100	60.709.709	100	289.098.068	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	5.171.967.955	100	5.301.267.154	100	5.433.798.833	100	5.569.643.804	100	5.708.884.899	100	27.185.562.645	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 1 Layanan Wilayah Mmanajemen Kebakaran	Persen	100	100	706.200.000	100	723.855.000	100	741.951.375	100	760.500.159	100	779.512.663	100	3.712.019.197	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
Mewujudkan daya saing ekonomi daerah																		
berbasis inovasi dan potensi Lokal																		
Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi	Indeks Gini	Persen	0,36	0,32	39.661.866.962	0,28	40.727.008.624	0,25	41.870.600.726	0,2	42.941.661.826	0,19	44.038.792.212	0,19	209.239.930.350			
Meningkatnya pertumbuhan sektor sektor unggulan daerah	Pertumbuhan ekonomi	Persen	-2,08	5.0-5.5%	38.854.293.962	5.5-5.6%	39.899.246.299	5.6-5.7%	41.022.144.343	5.7-5.8%	42.071.994.032	5.8-6.0%	43.147.382.725	5.8-6.0%	204.995.061.361			
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam yang memenuhi syarat	persen	100	100	15.000.000	100	15.375.000	100	15.759.375	100	16.153.359	100	16.557.193	100	78.844.927	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	persen	17	19	30.000.000	21	30.750.000	23	31.518.750	25	32.306.719	30	33.114.387	30	157.689.856	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang sehat	Per센	9.5	10	25.000.000	11	25.625.000	12	26.265.625	15	26.922.266	20	27.595.322	20	131.408.213	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Per센	7	9	50.000.000	10	51.250.000	12	52.531.250	14	53.844.531	15	55.190.645	15	262.816.426	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab.	Per센	5	5	30.000.000	7	30.750.000	8	31.518.750	10	32.306.719	15	33.114.387	15	157.689.856	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Percentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Persen	5	5	85.000.000	5	87.125.000	5	89.303.125	5	91.535.703	5	93.824.096	5	446.787.924	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Percentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	25	25	1.401.516.944	25.5 Perse n	1.436.554.868	26.2 Perse n	1.472.468.739	26.8 Perse n	1.509.280.458	27.5 Perse n	1.547.012.469	27.5 Perse n	7.366.833.478	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Percentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (IKK Outcome)	Persen	5	10	593.936.000	10	608.784.400	15	624.004.010	20	639.604.110	25	655.594.213	25	3.121.922.733	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Percentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	20.000.000	100	20.500.000	100	21.012.500	100	21.537.813	100	22.076.258	100	105.126.571	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Ketersediaan informasi industri	Persen	100	100	66.434.000	100	68.094.850	100	69.797.221	100	71.542.152	100	73.330.706	100	349.198.929	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Percentase kenaikan produksi perikanan tangkap	Persen	4.42	5.88	4.985.671.701	11.76	5.110.313.493	17.65	5.238.071.331	23.53	5.369.023.114	29.41	5.503.248.692	29.41	26.206.328.331	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kenaikan cakupan bina kelompok nelayan	Persen	3.33	6.45	99.880.000	12.9	102.377.000	19.35	104.936.425	25.81	107.559.836	32.26	110.248.832	32.26	525.002.093	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kenaikan produksi budidaya	Persen	1.87	1.96	3.148.841.741	3.92	3.227.562.785	5.88	3.308.251.854	7.84	3.390.958.151	9.8	3.475.732.104	9.8	16.551.346.635	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan produksi olahan hasil perikanan	Persen	1.22	1.22	773.946.580	2.24	793.295.245	3.36	813.127.626	4.48	833.455.816	5.56	854.292.212	5.56	4.068.117.479	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan Komsumsi ikan daerah	Persen	2.50	2.44	50.000.000	4.88	51.250.000	7.32	52.531.250	9.76	53.844.531	12.20	55.190.645	12.20	262.816.426	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana perkebunan sesuai kebutuhan	Persen	90	90	242.444.809	95	223.037.592	95	270.419.161	95	285.278.333	95	300.273.237	95	1.321.453.132	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100	100	3.715.415.180	100	3.808.300.560	100	3.903.508.073	100	4.001.095.775	100	4.101.123.170	100	19.529.442.758	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan	Persen	N/A	90	2.802.742.791	90	2.872.811.361	90	2.944.631.645	95	3.018.247.436	100	3.093.703.622	100	14.732.136.855	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100	100	6.539.733.179	100	6.703.226.508	100	6.870.807.171	100	7.042.577.350	100	7.218.641.784	100	34.374.985.992	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	100	100	124.883.855	100	128.005.951	100	131.206.100	100	134.486.253	100	137.848.409	100	656.430.568	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Percentase penurunan penyebaran OPT pada tanaman perkebunan	Persen	70	75	16.795.608	75	17.215.498	80	17.645.886	80	18.087.033	85	18.539.209	85	88.283.234	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Percentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	100	100	39.189.752	100	40.169.496	100	41.173.733	100	42.203.077	100	43.258.153	100	205.994.211	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Percentase perizinan usaha pertanian	Persen	75	75	242.444.809	75	223.037.592	80	270.419.161	80	285.278.333	85	300.273.237	85	1.321.453.132	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Percentase Perizinan Usaha Pertanian	Persen	N/A	100	101.636.800	100	104.177.720	100	106.782.163	100	109.451.717	100	112.188.010	100	534.236.410	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Percentase penyuluhan dan kelompok tani terbina	Persen	85	85	242.444.809	90	223.037.591	90	270.419.160	90	285.278.332	95	300.273.238	95	1.321.453.130	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Percentase Penyuluhan Dan Kelompok Tani Terbina	Persen	100	100	796.458.404	100	816.369.864	100	836.779.111	100	857.698.588	100	879.141.053	100	4.186.447.020	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	2.2	2.3	9.500.000.000	2.4	9.737.500.000	2.5	9.980.937.500	2.5	10.230.460.938	2.6	10.486.222.461	2.6	49.935.120.899	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Percentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	N/A	20	690.000.000	25	707.250.000	40	724.931.250	45	743.054.531	50	761.630.895	50	3.626.866.676	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	Kelompok	1	5	150.000.000	8	153.750.000	11	157.593.750	14	161.533.594	16	165.571.934	16	788.449.278	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	Persen	N/A	N/A	0	15	150.000.000	20	153.750.000	25	157.593.750	30	161.533.594	30	622.877.344	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	Persen	100	100	1.000.000.000	100	1.025.000.000	100	1.050.625.000	100	1.076.890.625	100	1.103.812.891	100	5.256.328.516	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	Kelompok	8	8	250.000.000	6	256.250.000	6	262.656.250	7	269.222.656	7	275.953.223	7	1.314.082.129	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	10	20	912.877.000	20	935.698.925	25	959.091.398	30	983.068.683	35	1.007.645.400	35	4.798.381.406	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum	Persen	2.3	3.3	112.000.000	4.3	114.800.000	5.3	117.670.000	6.3	120.611.750	7.3	123.627.044	7.3	588.708.794	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Investasi	Persen	15	15	807.573.000	15	827.762.325	15	848.456.383	15	869.667.794	15	891.409.487	15	4.244.868.989	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Nilai Investasi	Miliar Rupiah	310 iah	325 Miliar /Rupiah	300.000.000	340 Miliar /Rupiah	307.500.000	355 Miliar /Rupiah	315.187.500	360 Miliar /Rupiah	323.067.188	375 Miliar /Rupiah	331.143.867	375 Miliar /Rupiah	1.576.898.555	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Peningkatan Investor	Investor	35	39	70.000.000	44	71.750.000	51	73.543.750	59	75.382.344	65	77.266.902	65	367.942.996	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Percentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persen	100	100	90.000.000	100	92.250.000	100	94.556.250	100	96.920.156	100	99.343.160	100	473.069.566	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Percentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Persen	50	50	322.573.000	50	330.637.325	50	338.903.258	50	347.375.840	50	356.060.236	50	1.695.549.659	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Percentase Laporan Data Base Perizinan dan Non Perizinan	Persen	100	100	25.000.000	100	25.625.000	100	26.265.625	100	26.922.266	100	27.595.322	100	131.408.213	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mengentaskan Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,4	6	2.790.240.000	5,5	2.859.996.000	5	2.931.495.901	4,5	3.004.783.299	4	3.079.902.880	4	14.666.418.080	
Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,89	2,75	368.240.000	2,49	377.446.000	2,27	386.882.151	2,05	396.554.204	2	406.468.059	2	1.935.590.414	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	persen	N/A	20	25.000.000	20	25.000.000	20	27.000.000	22	27.000.000	25	27.000.000	25	131.000.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	persen	62	68	106.600.000	70	109.265.000	75	111.996.625	80	114.796.541	85	117.666.454	85	560.324.620	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	0.93	21	190.140.000	23	194.893.500	25	199.765.838	27	204.759.983	29	209.878.983	29	999.438.304	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	persen	44	46	46.500.000	46	48.287.500	47	48.119.688	48	49.997.680	49	51.922.622	49	244.827.490	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Skala	0,611 (Berke mbang)	0,624 (Berke mbang)	2.422.000.000	0,645 (Berke mbang)	2.482.550.000	0,687 (Berke mbang)	2.544.613.750	0,7 (Berke mbang)	2.608.229.095	0,707 (Maju)	2.673.434.821	0,707 (Maju)	12.730.827.666	
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki penataan desa yang berkualitas	persen	N/A	50	500.000.000	60	512.500.000	70	525.312.500	80	538.445.313	90	551.906.445	90	2.628.164.258	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN MAMUJU

Nomor SOP	009/30/1/2025
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	
	DR.H. SUAIB, S.Sos, M.M Pembina Utama Madya NIP. 19661007 198703 1 011 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
- Peraturan	1 S-1 Sederajat
- Peraturan	2 Mampu mengoperasikan program komputer (MS Word, Excel dan Internet) 3 Memiliki tingkat ketelitian yang baik 4 Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan 6 Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam tim

Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
- SOP Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju	1 Jaringan Internet 2 Komputer 3 Printer 4 ATK 5 Flash Disc

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
- Penyusuna	Data - data dari SKPD diolah dan hasilnya dicetak untuk dijadikan Dokumen Laporan Kinerja.
- Dibuat time schedule terkait proses penyusunan LKjIP	

REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN MAMUJU

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	100
	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Peringkat / Nilai	Baik/A	Perlu Perbaikan/B	75
	Nilai LPPD	Skor	Sangat Tinggi	Sedang	50
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	90	76,74	85,26
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Per센	70	78	111,43
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Per센	70	82	117,14
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Per센	80	74,66	93,32
	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Sedang	Sedang	100
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Per센	68,70	71,86	104,59
	Indeks Pendidikan	Skala	0,42	0,64	152,38
	Indeks Kesehatan	Skala	0,578	0,802	138.75
	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	32.500	10.440	32,12
	Indeks Pemberdayaan Gender	Per센	59,87	60,96	101,82
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Per센	65	77	122
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks ketentraman dan ketertiban	Per센	100	99,65	99,65
	Indeks Kriminilitas	Per센	100	99,65	99,65
Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	Indeks Gini	Per센	0,25	0,425	58,82
	Pertumbuhan ekonomi	Per센	5.6-5.7%	6,47	113,50
Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi	Per센	15	45,04	300,26
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penduduk Miskin	Per센	5	7,15	69,93
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Per센	2,27	2,77	81,95
Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Skala	0,698 (Berkembang)	0,667 (Berkembang)	96

DAFTAR PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024

1. UHC Award dari Kementerian Kesehatan Atas Komitmen Dalam Memberikan Jaminan Kesehatan Gratis Kepada Masyarakat
2. Penghargaan sebagai daerah Peduli Ham dari Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2024
3. Penghargaan dari BPKP terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dalam Kategori Maturisasi Level 3.
4. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dari BPK RI, Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Berturut-turut dalam dua tahun terakhir
5. Penghargaan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju, sebagai Pemohon Lelang Barang Non Eksekusi Tahun 2024
6. Penghargaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2024 Dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
7. Penghargaan Kharisma Event Nusantara Atas Kegiatan Manakarra Fair 2024 dari Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif



**PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU**



(0426) 2324500



www.mamujukab.go.id



Jl. Soekarno Hatta No. 1